

SEKOLAH POLISI NEGARA DI MAKASSAR

ACUAN PERANCANGAN

Diajukan sebagai persyaratan
Ujian Sarjana Teknik Arsitektur



Oleh :

ANDRI F. SARBUNAN

45 93 043 003

UNIVERSITAS

BOSOWA



JURUSAN ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2000

LEMBAR PENGESAHAN

PROYEK : UJIAN SARJANA TEKNIK ARSITEKTUR
UNIVERSITAS "45"
JUDUL : SEKOLAH POLISI NEGARA DI MAKASSAR
PENYUSUN : ANDRI F. SARBUNAN
NO. STB : 45 93 043 003
PERIODE/TAHUN : I / 2000 - 2001

Menyetujui

Dosen Pembimbing

1.


DR. Ir. H. M. RAMLI RAHIM, M.Eng
Nip : 130 884 776

2.


Ir. PANANRANGI. AS
Nip. 130 565 988

3.


Ir. MURSYID MUSTAFA, MSi
Nip : 131 911 693

Mengetahui

Ketua Jurusan Arsitektur
Fakultas Teknik
Universitas 45


Ir. HADRAWI MACHMUD, MSi
NIP. 131 962 497

KATA PENGANTAR



Puji syukur saya persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan berkat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu persyaratan pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar, Untuk memperoleh gelar sarjana Teknik Arsitektur.

Adapun Judul Tugas Akhir adalah :

"SEKOLAH POLISI NEGARA DI MAKASSAR"

yang merupakan acuan perancangan yang ditransformasikan ke perancangan fisik. Kekurangan jelasan ada dalam penulisan ini disebabkan terbatasnya waktu, tenaga dan kemampuan, namun demikian saya berharap dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa- masa mendatang.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada

- 1. Bapak Dr. Ir. H. M .Ramli Rahim, M. Eng**
- 2. Bapak Ir. Pananrangi A. S.**
- 3. Bapak Ir. Mursyid Mustafa, MSi.**

yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan pengarahan pembuatan tugas akhir mulai dari tahap awal hingga selesainya penulisan ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Dekan Fakultas Teknik *Ir. Mursyid Mustafa, MSi*
2. Ketua Jurusan Teknik Arsitektur *Ir. Hadrawi Machmud, MSi.*
3. Kadit Intelpam *Sr. Supt. Timbul H. Sianturi.*
4. Kepala Sekolah SPN Batua *Supt. Soelistyono Smik*
5. Kepala Tata Urusan Dalam *Aipda Dra. Supiyani*
6. Seluruh staf dan karyawan SPN Batua.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan selama dalam bangku perkuliahan, serta seluruh staf Jurusan Teknik Arsitektur
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian tugas akhir ini
9. dan kepada kedua orang tua tercinta, serta kakak-kakak tersayang yang telah membiayai dan memberikan doa restunya selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Akhir kata semoga penulisan ini bermanfaat adanya.

Makassar, Desember 2000

Penyusun

Andri F. Sarbunan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ungkapan Masalah	2
C. Tujuan	3
D. Lingkup Pembahasan	3
E. Metode dan Sistematika Pembahasan	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sekolah Polisi Negara	5
B. Organisasi Pendidikan Kepolisian	6
C. Pendidikan Kejuruan Kepolisian	9
D. Istilah dan Tanda Kepangkatan Kepolisian	15
BAB III. SEKOLAH POLISI NEGARA DI MAKASSAR.	
A. Bentuk Kegiatan	18
B. Jenis kegiatan	19
C. Pelaku kegiatan	20
D. Penjabaran Kurikulum	22
E. Sistem Pengajaran	26
F. Standar Latar Tugas dan Kemampuan Hasil Didik Pada Sekolah Polisi Negara	29
G. Struktur Organisasi	33

BAB IV. KONSEP DASAR PERANCANGAN

A. Konsep Dasar Fisik Makro	34
1. Penentuan lokasi	34
2. Pemilihan site	35
3. Ungkapan kegiatan	39
4. Konsep tata massa	41
5. Konsep ruang luar	44
B. Konsep Dasar Fisik Mikro	49
1. Konsep pola kegiatan	49
2. Konsep kebutuhan ruang	52
3. Konsep besaran ruang	54
4. Konsep hubungan ruang	59
5. Struktur sistem organisasi ruang	64
6. Konsep penampilan bangunan	65
7. Konsep struktur dan konstruksi	66
C. Sistem Environment dan Kelengkapan Bangunan (Service Engineering)	69
1. Pengadaan air bersih	69
2. Sistem pembuangan	70
3. Sistem pengamanan bangunan	70
4. Sistem jaringan listrik	71
5. Sistem komunikasi	72
6. Sistem penghawaan	72
7. Sistem pencahayaan	73
8. Sistem sirkulasi dan pencapaian	73
9. Sistem pembuangan sampah	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR ISTILAH

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan hakekat ancaman Kamtibmas dan masalah perlindungan hukum sangat kompleks dan tidak pernah berhenti, malah cenderung untuk terus meningkat seiring dengan pembangunan-pembangunan dan perubahan-perubahan sosial. Keadaan yang demikian membuat kehadiran polisi ditengah-tengah masyarakat dengan sikap dan kemampuan yang handal menjadi kebutuhan mutlak.

Polri sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU no. 20 tahun 1982 akan berhasil dan berdaya guna dalam pelaksanaan tugasnya, apabila secara dini mengetahui dan memahami sasaran tugas yang sedang dan akan dihadapi.

Dengan demikian maka dituntut adanya aparatur penegak hukum yang memiliki kemampuan profesional, menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab.

Untuk menghasilkan aparatur penegak hukum yang memiliki kemampuan profesional, menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab dibutuhkan suatu lembaga pendidikan kepolisian negara yang sesuai dengan tuntutan jaman yang makin berkembang.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka SPN dituntut untuk dapat menghasilkan aparatur penegak hukum yang handal dan berdedikasi tinggi, serta mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

B. Ungkapan Masalah

1. Bagaimana menentukan lokasi dan site SPN yang sesuai dengan persyaratan yang menunjang perkembangan tugas-tugas kepolisian.
2. Bagaimana menentukan kebutuhan ruang dan besaran ruang yang dapat menampung semua peserta pendidikan.
3. Bagaimana menciptakan suatu tempat latihan yang sesuai dengan kebutuhan polisi.
4. Bagaimana menentukan sistem struktur pada SPN.

C. Tujuan

1. Untuk merencanakan suatu SPN yang sesuai dengan lokasi yang menunjang perkembangan.
2. Untuk merencanakan SPN yang dapat menampung seluruh peserta pendidikan.
3. Untuk menyusun suatu acuan perancangan yang memadai yang kemudian diwujudkan dalam proses perencanaan dan perancangan fisik
4. Menciptakan suatu tempat latihan yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan tugas-tugas kepolisian.

D. Lingkup Pembahasan

1. Pembahasan dilakukan dalam lingkup arsitektur serta akan ditinjau dengan disiplin ilmu lainnya yang dapat menunjang pembahasan
2. Pembahasan dilakukan pada usaha-usaha untuk merencanakan dan merancang SPN di Sulawesi Selatan
3. Perencanaan SPN diproyeksikan untuk 20 tahun mendatang dengan tahun dasar 2000

E. Metode dan Sistematika Pembahasan

1. Metode pembahasan

Metode pembahasan secara singkat dengan analisa deskriptif yaitu :

- a. Studi literatur dari buku tentang SPN dan peraturan tentang kepolisian.
- b. Mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait dengan bidang kepolisian.

2. Sistematika pembahasan

- a. Tahap pertama : merupakan pendahuluan yang merupakan gambaran umum secara singkat tentang masalah dan isi penulisan yang dituangkan dalam latar belakang yang merupakan inti masalah.
- b. Tahap kedua : merupakan tinjauan pustaka.
- c. Tahap ketiga : pembahasan mengenai SPN di Makassar.
- d. Tahap keempat : pendekatan konsep dasar perencanaan fisik SPN di Makassar.

BAB II
TINJAUAN
PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sekolah Polisi Negara

1. Sekolah :
 - a. Bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran.
 - b. Waktu atau pertemuan ketika murid-murid diberi pelajaran.
 - c. Suatu tempat, lingkungan untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan belajar mengajar.

(Sumber : Kamus Bahasa Indonesia , edisi ke 2 Th. 1992)

2. Kepolisian :
 - a. Badan pemerintah yang bertugas memelihara ketertiban Umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang).
 - b. Anggota, badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan negara, dan sebagainya).

(Sumber : Kamus Bahasa Indonesia, edisi ke 2 Th. 1992)

3. Negara :
 - a. Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.

- b. Kelompok sosial yang memiliki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir dibawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, serta berhak menentukan tujuan nasionalnya.

(Sumber : Kamus Bahasa Indonesia, edisi ke 2 Th. 1992)

Jadi Sekolah Polisi Negara adalah bangunan, lembaga atau lingkungan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar tentang penegakan hukum-hukum dan pembelaan negara yang berada dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.

B. Organisasi Pendidikan Kepolisian

1. Organisasi pendidikan sepenuhnya berada di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia.
2. Jenjang pendidikan dalam lingkungan Kepolisian Republik Indonesia :
 - a. *SECATAM*, Sekolah Calon Tamtama, mendidik, melatih dan menggembleng siswa menjadi prajurit polisi yang berpangkat Barada, lama pendidikan 3 bulan.

Persyaratan calon :

- berijazah serendah-rendahnya SLTP atau sederajat
- lulus seleksi kesehatan, kesamaptaaan jasmani, mental idiologi / akademik dan parade
- syarat-syarat lain yang ditentukan kemudian

- b. **SECABA**, Sekolah Calon Bintara, mendidik, melatih dan menggembleng siswa menjadi prajurit polisi yang berpangkat Sersan Dua, lama pendidikan 8 bulan

Persyaratan calon :

- berijazah serendah-rendahnya SLTA atau sederajat
- lulus seleksi kesehatan, kesamaptaan jasmani, mental idiologi, psikotes, ujian tertulis / akademik dan parade
- syarat-syarat lain yang ditentukan kemudian

- c. **AKPOL**, Akademi Militer Polisi, mendidik, melatih dan menggembleng siswa menjadi prajurit polisi berpangkat Letnan dua, lama pendidikan 4 tahun.

Persyaratan calon :

- berijazah SLTA jurusan IPA dengan nilai rata-rata 7,0 (tujuh koma nol)
- lulus seleksi kesehatan, kesamaptaan jasmani, mental idiologi, psikotes, ujian tertulis / akademik dan parade
- syarat-syarat lain yang ditentukan kemudian

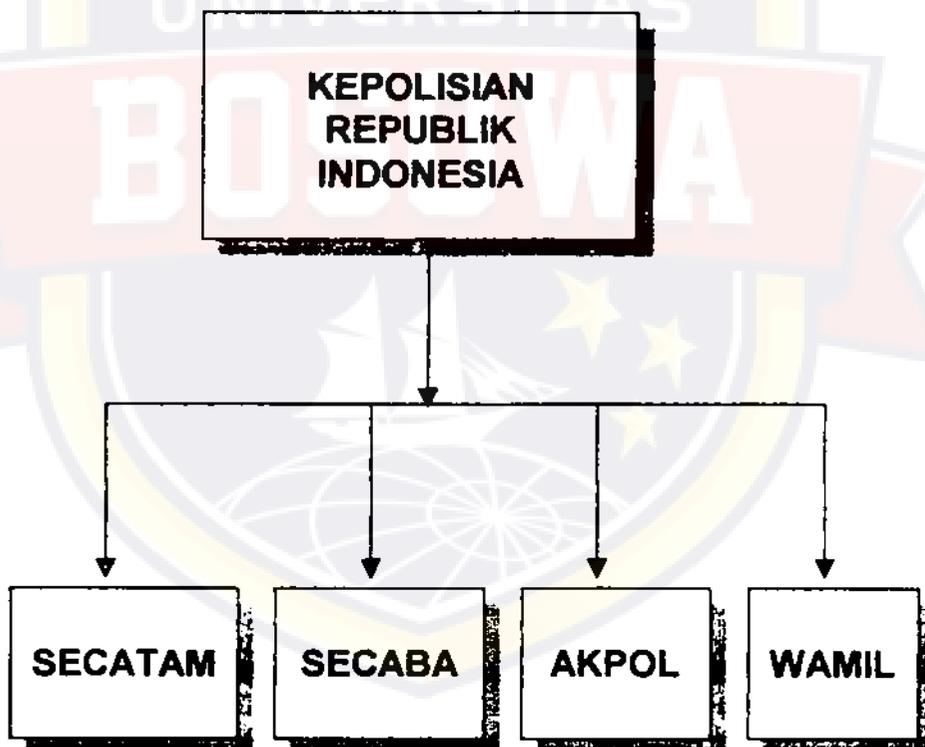
d. **WAMIL POL**, Wajib Militer Polisi, mendidik, melatih dan menggembleng siswa menjadi prajurit berpangkat Letnan dua, lama pendidikan 9 bulan

Persyaratan calon :

- berijazah sarjana (S1) atau sederajat
- lulus seleksi kesehatan, kesamaptan jasmani, mental idiologi, psikotes, ujian tertulis / akademik dan parade
- syarat-syarat lain yang ditentukan kemudian

(Sumber SPN Batua, Makassar)

Skema Organisasi Pendidikan Kepolisian



(Sumber : POLDA Sul-Sel)

C. Pendidikan Kejuruan Kepolisian



1. SABHARA : Samapta Bayangkara

a. Tugas pokok

Melaksanakan tugas kepolisian yang bersifat preventif berupa mencegah, menangkal segala bentuk pelanggaran dan kejahatan serta melaksanakan tindakan represif tahap pertama terhadap segala bentuk pelanggaran dan kejahatan maupun gangguan ketertiban yang dihadapi guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun pelaksanaan tugas Sabhara, terwujud dalam bentuk :

- 1) Penjagaan
- 2) Pengawasan
- 3) Patroli
- 4) TPTKP

b. Fungsi dan peranan Sabhara

Fungsi Sabhara adalah merupakan sebagian dari fungsi kepolisian yang bersifat preventif yang mampu menyelenggarakan patroli, penjagaan dan pengawalan serta kegiatan-kegiatan lainnya guna memelihara keselamatan

orang, benda dan masyarakat termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

2. LANTAS : Lalu Lintas Kepolisian

a. Tugas pokok

Sebagai salah satu unsur Polri yang melaksanakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang pengendalian lalu lintas untuk mencegah serta meniadakan gangguan, hambatan dan ancaman di bidang lalu lintas, agar terjamin keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas di jalan umum.

b. Fungsi

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pokok tersebut, polantas melakukan fungsi kepolisian di bidang lalu lintas (fungsi Lantas Pol) dengan melakukan kegiatan-kegiatan :

1) penegakan hukum lalu lintas (Traffic Law Enforcement)

adalah segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan di bidang lalu lintas, agar undang-undang dan ketentuan perundang-undangan ditaati oleh setiap pemakai jalan dan dapat bersifat :

a) preventif :

pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas

b) represif :

penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas serta penyidikan terjadinya kecelakaan lalu lintas baik secara represif yustisiil maupun represif non yustisiil (tindakan kepolisian).

3. *RESERSE*

a. Tugas pokok

Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya, membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Fungsi dan peranan

1) Fungsi

Menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Reserse Kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana yang meliputi Reserse umum, ekonomi, narkotika, uang palsu dan dokumen palsu, koordinasi PPNS dan tindakan pidana tertentu, tindakan pidana korupsi dan pengelolaan Pusat Informasi Kriminil.

2) Peranan

Korserse Polri dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut :

- a) menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan represif kepolisian melalui upaya penyidikan kasus-kasus kejahatan menonjol yang mempunyai intensitas tinggi, berdampak nasional maupun internasional, berdasarkan undang-undang pidana yang berlaku dalam rangka kerja sama internasional melalui ICPO / Interpol.
- b) mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Korserse
- c) menyelenggarakan pembinaan fungsi teknis Reserse Kepolisian dan dukungan operasional pada satuan-satuan polri
- d) mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) mengajukan pertimbangan dan saran kepada kapolri mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

4. **BIMMAS** : Bimbingan Masyarakat

a. Tugas pokok

- 1) Pada tingkat strategis, Bimmas bertugas membantu kapolri dalam merumuskan dan menyiapkan kebijakan teknis kapolri dibidang pembinaan kemampuan dan operasional Bimmas Pol yang meliputi fungsi teknis pembinaan keamanan swakarsa, pembinaan ketertiban masyarakat, pembinaan remaja, pemuda dan wanita, pembinaan teknis alat-alat kepolisian khusus dan sospol sesuai kebijakan pangab.
- 2) Pada tingkatan operasional, Bimmas bertugas menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas terutama mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi dan peranan

1) Fungsi

Sebagai wadah / unit profesional dalam melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjadikan masyarakat agar mampu mengamankan dirinya sendiri dan lingkungan.

2) Peranan

Adalah berupa segala usaha dan kegiatan dalam bentuk pembimbing, pendorong, pengarah dan penggerak masyarakat.

5. INTEL : Intelijen

- a. Tugas, fungsi dan peranan Intelijen Kepolisian sebagai mata dan telinga kesatuan dalam melakukan deteksi dini dan peringatan dini merupakan salah satu unsur tercapainya tugas Polri yang telah ditetapkan bersama fungsi-fungsi kepolisian lainnya
- b. Tugas Intelijen Polri lebih dititik beratkan dalam pelaksanaan deteksi dini yang hasilnya (produk Intel) diharapkan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pembinaan dan operasional Polri, baik di bidang preemtif, preventif maupun represif.
- c. Keseluruhan tugas pokok, fungsi dan peranan Intelijen Kepolisian adalah :
 - 1) Melaksanakan deteksi dan identifikasi terhadap segala bentuk hakekat ancaman kamtibmas, baik Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), Police Hazard (PH) dan ancaman faktual
 - 2) Menciptakan situasi dan kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri

- 3) Melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan masyarakat dari ancaman / pengaruh yang akan merugikan kesatuan dan persatuan berbangsa dan bernegara
- 4) Melaksanakan pengamanan ke dalam tubuh polri dari ancaman / hambatan yang datang dari dalam maupun dari luar tubuh polri.

D. Istilah dan Tanda Kepangkatan Kepolisian

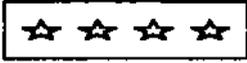
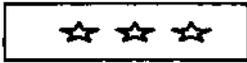
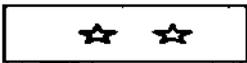
1. Istilah kepangkatan

GOLONGAN	PANGKAT LAMA	PANGKAT BARU	SINGKATAN
PERWIRA TINGGI	<ul style="list-style-type: none"> ◆ JENERAL ◆ LETJEN ◆ MAYJEN ◆ BRIGJEN 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ JENDRAL ◆ KOMISARIS JENERAL ◆ INSPEKTUR JENERAL ◆ BRIGJEN 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ JEN ◆ KOMJEN POL ◆ IRJEN POL ◆ BRIGJEN POL
PERWIRA MENENGAH	<ul style="list-style-type: none"> ◆ KOLONEL ◆ LETKOL ◆ MAYOR 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ SENIOR SUPERINTENDENT ◆ SUPERINTENDENT ◆ ASISTEN SUPERINTENDENT 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ SR. SUPT ◆ SUPT ◆ ASS. SUPT
PERWIRA PERTAMA	<ul style="list-style-type: none"> ◆ KAPTEN ◆ LETTU ◆ LETDA 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ SENIOR INSTRUKTUR ◆ INSPEKTUR I ◆ INSPEKTUR II 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ SR. INSP ◆ IPTU ◆ IPDA
BINTARA TINGGI	<ul style="list-style-type: none"> ◆ PELDA ◆ PELTU 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ AJUDAN INSPEKTUR I ◆ AJUDAN INSPEKTUR II 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ AIPTU ◆ AIPDA
BINTARA	<ul style="list-style-type: none"> ◆ SERMA ◆ SERKA ◆ SERTU ◆ SERDA 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ SERMA ◆ SERKA ◆ SERTU ◆ SERDA 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ SERMA ◆ SERKA ◆ SERTU ◆ SERDA
TAMTAMA	<ul style="list-style-type: none"> ◆ KOPRAL KEPALA ◆ KOPRAL I ◆ KOPRAL II ◆ BAYANGKARA KEPALA ◆ BAYANGKARA I ◆ BAYANGKARA II 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ BAYANGKARI UTAMA I ◆ BAYANGKARI UTAMA II ◆ BAYANGKARI UTAMA MUDA ◆ BAYANGKARA KEPALA ◆ BAYANGKARA I ◆ BAYANGKARA II 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ BHARATU ◆ BHARADA ◆ BHARAMUD ◆ BHARAKA ◆ BARATU ◆ BARADA

(Sumber : POLDA Sul-Sel)

2. Tanda kepangkatan

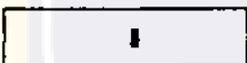
a. Perwira Tinggi

- 1)  = empat bintang = Jenderal
- 2)  = tiga bintang = Komjen Pol
- 3)  = dua bintang = Irjen Pol
- 4)  = satu bintang = Brigjen Pol

b. Perwira Menengah

- 1)  = tiga bunga = Sr. Supt.
- 2)  = dua bunga = Supt.
- 3)  = satu bunga = Ass. Supt.

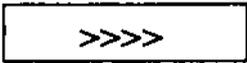
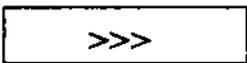
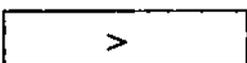
c. Perwira Pertama

- 1)  = tiga balok = Sr. Insp.
- 2)  = dua balok = Iptu
- 3)  = satu balok = Ipda

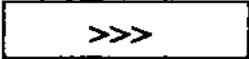
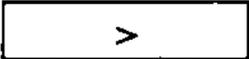
d. Bintara Tinggi

- 1)  = dua em = Aiptu
- 2)  = satu em = Aipda

e. Bintara Pertama

- 1)  = empat kuning = Serma
- 2)  = tiga kuning = Serka
- 3)  = dua kuning = Sertu
- 4)  = satu kuning = Ser da

f. Prajurit Pertama

- 1)  = tiga ekor ikan merah = Bharatu
- 2)  = dua ekor ikan merah = Bharada
- 3)  = satu ekor ikan merah = Bharumud
- 4)  = tiga garis merah = Bharaka
- 5)  = dua garis merah = Baratu
- 6)  = satu garis merah = Barada

(Sumber : SPN Batua, Makassar)



BAB III
SEKOLAH
POLISI NEGARA
DI MAKASSAR



BAB III

SEKOLAH POLISI NEGARA DI MAKASSAR

A. Bentuk Kegiatan

Bentuk-bentuk kegiatan dalam SPN Makassar merupakan pelaksanaan kegiatan pelatihan, pengajaran dan pengemblengan terhadap siswa calon anggota Polri selama delapan bulan latihan (38 minggu) dengan pembagian jam latihan sesuai metode pendidikan, antara lain :

1. Bentuk kegiatan pengajaran tentang disiplin ilmu kepolisian.
2. Bentuk kegiatan pelatihan fisik dan mental spiritual.
3. Bentuk kegiatan pengajaran non fisik dan penyajian materi tentang hukum dan perundang-undangan di Indonesia.
4. Bentuk pengenalan dan pelatihan menggunakan alat dan perlengkapan kepolisian.
5. Bentuk pengajaran tentang penanganan masalah-masalah kamtibmas di masyarakat.
6. Bentuk kegiatan pengembangan bakat dan minat serta kerohanian.
7. Bentuk kegiatan pengajaran tentang abdi kepada masyarakat bangsa dan negara.
8. dan bentuk-bentuk kegiatan pengajaran lainnya yang ada kaitannya dengan dunia kepolisian.

B. Jenis Kegiatan

Jenis-jenis kegiatan dalam SPN Makassar, mempunyai kaitan dengan tugas-tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kegiatan di lingkungan SPN.

1. Jenis kegiatan khusus

Jenis kegiatan yang khusus diperuntukkan bagi siswa calon anggota Polri, yaitu latihan dasar sabhara, fisik, mental spiritual dan keterampilan kepolisian.

2. Jenis kegiatan umum

Jenis kegiatan yang diperuntukkan bagi seluruh anggota yang bertugas di SPN Makassar.

3. Jenis kegiatan kelompok

Jenis kegiatan yang diperuntukkan bagi satuan-satuan lingkup SPN.

4. Jenis kegiatan perorangan

Jenis kegiatan yang diperuntukkan bagi perorangan, sesuai dengan jadwal tugas masing-masing anggota.

5. Jenis kegiatan kemasyarakatan

Jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti; bakti sosial, anjang sana ke panti jompo dan lain sebagainya.

C. Pelaku Kegiatan

1. Pelaku kegiatan

Pelaku kegiatan dalam SPN Makassar adalah :

a. Kegiatan pengelola

- 1) Mengatur, menyiapkan dan menjalankan sistem pendidikan dan latihan**
- 2) Menyusun jadwal pendidikan dan latihan**
- 3) Membuat administrasi anggota polri, siswa calon polri dan pegawai negeri sipil di lingkungan SPN**
- 4) Tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pengelola**

b. Kegiatan instruktur / pelatih

- 1) Melaksanakan tugas-tugas instruktur sesuai dengan bidang dan keahlian**
- 2) Memberikan latihan kepada siswa pendidikan, berupa latihan fisik dan non fisik**
- 3) Memberikan latihan tentang peraturan baris berbaris dan penggunaan alat-alat kepolisian**
- 4) Memberikan latihan tentang mengatasi masalah pada tempat kejadian perkara**
- 5) Dan latihan-latihan lainnya lingkup dunia kepolisian.**

c. Kegiatan siswa

- 1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan fisik dan mental
- 2) Melaksanakan kegiatan dan latihan non fisik, mental
- 3) Melaksanakan semua ketentuan dan tunduk di bawah peraturan-peraturan dalam SPN Makassar.

d. Kegiatan service

- 1) Menyediakan segala perlengkapan pendidikan dan latihan
- 2) Menyediakan perbekalan dan kebutuhan logistik.

2. Unsur pelaku kegiatan

Unsur-unsur pelaku kegiatan dalam SPN, yaitu semua anggota yang bertugas dalam sekolah tersebut di atas, mulai dari tim pengajar, tim pelatih dan tim pendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, yang terdiri dari :

- a. Tamtama berjumlah 3 (tiga) personil
- b. Bintara berjumlah 85 (delapan puluh lima) personi
- c. Pama berjumlah 60 (enam puluh) personil
- d. Pamen berjumlah 5 (lima) personil
- e. PNS (pegawai negeri sipil) 27 (dua puluh tujuh) orang
- f. Calon pegawai 4 orang
- g. Ditambah dengan siswa yang mengikuti pendidikan secaba polri.

D. Penjabaran Kurikulum

1. Pentahapan

Sesuai dengan kurikulum / sistem pendidikan lingkup SPN dibagi menjadi tiga tahap, yaitu :

a. Tahap pertama (tahap dasar-dasar bayangkara) = 40%

Tahap pembentukan fisik dan mental serta pembekalan kepada peserta didik agar memiliki pengetahuan, sikap mental dan kejuangan sebagai perwujudan pengamalan Tri Brata dan Catur Prasetya melalui pendekatan bimbingan dan pengasuhan. Tahap ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan / 590 jam pelajaran.

b. Tahap kedua (tahap dasar-dasar profesi kepolisian) = 40%

Tahap pembekalan mengenai pengetahuan fungsi teknis operasional polri, dukungan teknis, pengetahuan hukum dan perundang-undangan serta teori dasar fungsi sabhara. Tahap ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan / 660 jam pelajaran.

c. Tahap ketiga (tahap dasar sabhara) magang = 20%

Tahap pembekalan / pemantapan keterampilan teknis dan taktis fungsi sabhara serta pembulatan seluruh rangkaian pembekalan sehingga mencapai kualifikasi bintangara sabhara polri. Tahap ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan / 350 jam pelajaran.

2. Susunan mata pelajaran

a. Orientasi

1) Orientasi Dik

- a) Pengenalan lingkungan
- b) Pola kurikulum, teknik belajar dan sistem evaluasi
- c) PUD/perkuisis
- d) Tes awal kesehatan
- e) Jam pimpinan

2) Etika profesi kepolisian

- a) Pembinaan rohani
- b) Kerukunan hidup beragama

3) Etika kepolisian

- a) Pancasila
- b) Tri brata, catur prasetya dan kode etik polri
- c) Sejarah perjuangan polri
- d) Hak azasi manusia

b. Pengetahuan dan ketrampilan dasar profesi

1) Disiplin dasar polri

- a) Peraturan Baris Berbaris (PBB)
- b) Peraturan penghormatan
- c) Peraturan perundang-undangan dasar polri (PUUD) polri
- d) Tata upacara

- e) Seragam polisi
- f) Peraturan disiplin polisi
- 2) Penggunaan alat kepolisian
 - a) Peralatan dan menembak
 - b) Pengetahuan kompleks polisi
 - c) Operator komputer/mengetik
 - d) Penggunaan borgol, tongkat Kepolisian dan peluit
- 3) Hukum dan perundang-undangan
 - a) KUHP
 - b) KUHPA
 - c) Kapita selekta perundang-undangan
 - d) UU No 28/1997 tentang polisi
 - e) Diskresi kepolisian
- 4) Operasional kepolisian
 - a) Operasional reserve
 - b) Operasional intelkam
 - c) Operasional lalu lintas
 - d) Operasional bimmas
- 5) Pengetahuan sosial
 - a) Komunikasi sosial
 - b) Psikologi massa
 - c) Sosiologi masyarakat kota

6) Management polri

- a) Dasar management polri (interpersonal skill, serta analisa tugas dan kegiatan/ TAA)
- b) Organisasi, tupok, fungsi dan peranan polri

c) Jukminu

d) Puskodalops

7) Dukungan teknis

- a) Identifikasi polri
- b) Laboratorium forensik dan kedokteran kehakiman
- c) Mengemudi R-2

8) Dasar sabhara

- a) Hakekat ancaman kamtibmas (FKK/PH/AF)
- b) Pengetahuan dan penjagaan
- c) Laporan Kepolisian/berita acara
- d) TPTKP
- e) Patroli
- f) Pengawasan
- g) Tipiring
- h) Dalmas PHH
- i) Administrasi sabhara
- j) Pengapungan rumah
- k) P3K/ kesehatan lapangan



- 9) Kesamaptaan dan binjas polri
 - a) Pembinaan jasmani
 - b) Renang pertolongan
 - c) Mountaineering/ketangkasan lapangan
 - d) Beladiri polri/judo
 - e) Kesamaptaan jasmani
 - f) Test kesamaptaan jasmani
- 10)Latihan terpadu
 - a) Latihan pembulatan tahap I
 - b) Latihan teknis persiapan magang
- 11)Muatan lokal
 - a) Budaya dan hukum adat setempat
 - b) Perda-perda setempat
 - c) Budi pekerti
- 12)Lain-lain
 - a) Upacara buka/tutup
 - b) Ceramah pembekalan
 - c) Jam cadangan

E. Sistem Pengajaran

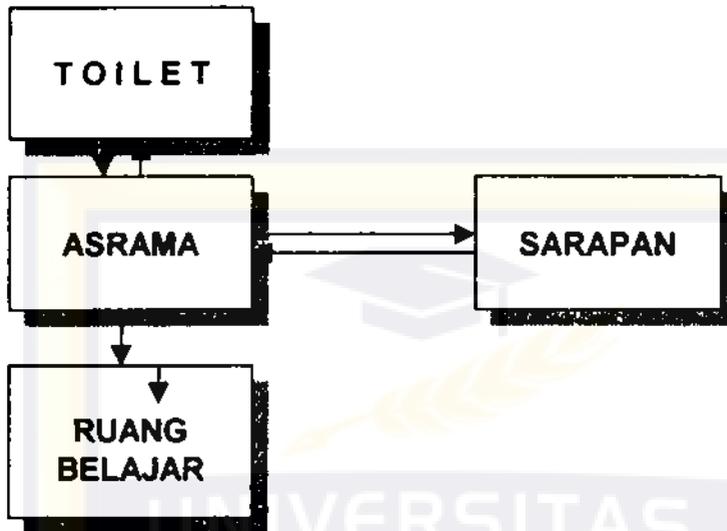
Sistem pengajaran terbagi atas beberapa bagian sesuai dengan tingkat dan kebutuhannya, antara lain :

1. Sistem pengajaran

Sistem pengajaran teori diberikan kepada masing-masing kelompok latihan atau dalam bahasa kepolisian disebut *kompi*, masing-masing kompi terdiri dari 90 ~ 100 siswa tergantung yang

tinggal di dalam satu barak, yang sudah dilengkapi dengan tempat tidur, toilet dan ruang belajar.

Skema Sistem Pengajaran Teori



2. Sistem pengajaran praktek

Pengajaran praktek dilaksanakan setelah siswa selesai mendapatkan pengajaran teori. Pengajaran praktek dilakukan pada tempat-tempat praktek yang sesuai, misalnya : latihan menembak, latihan menggunakan alat-alat kepolisian dan lain sebagainya.

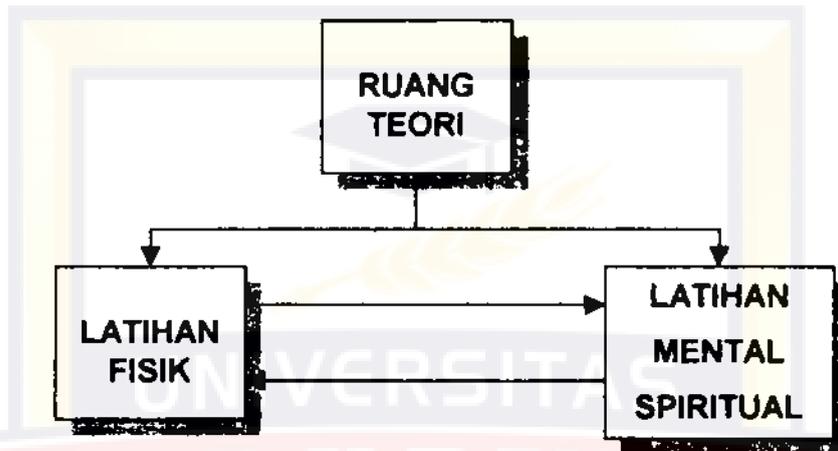
Skema Sistem Pengajaran Praktek



3. Sistem pengajaran fisik dan mental

Sistem pengajaran fisik dan mental didasarkan pada latihan ketahanan tubuh, jasmani dan ketahanan mental spiritual sesuai dengan standar-standar dari kepolisian negara.

Skema Sistem Pengajaran Fisik dan Mental



4. Sistem pengajaran basah, yaitu latihan-latihan yang dilakukan pada daerah-daerah yang berair

5. Sistem pengajaran dasar-dasar sabhara

Sistem pengajaran dilaksanakan di lapangan latihan yang sudah dilengkapi dengan fasilitas latihan yang memadai.

Skema Sistem Pengajaran Dasar-Dasar Sabhara

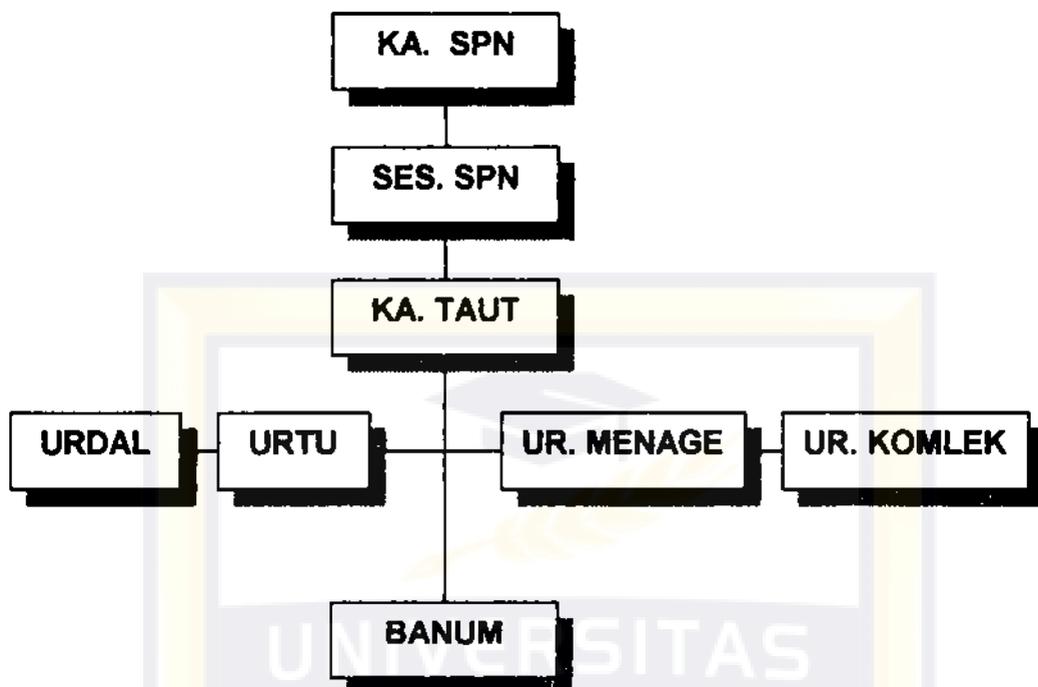


- a. Kemampuan membina diri sendiri selaku anggota Polri
- 1) Melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut serta bertoleransi terhadap umat agama yang lain
 - 2) Memahami dan menampilkan diri sebagai anggota Polri yang berdisiplin dan berdedikasi tinggi
 - 3) Memahami dan dapat menampilkan diri yang samapta guna mendukung operasional kesatuan
 - 4) Memahami dan dapat memberi instruksi yang jelas dan efektif kepada bawahan / anggotanya.
- b. Kemampuan pemahaman dan penegak hukum, meliputi :
- 1) Memahami UU No. 28 / 97 tentang kepolisian negara RI
 - 2) Memahami dan dapat menerapkan pasal-pasal hukum pidana dan acara pidana
 - 3) Memahami dan dapat menerapkan HAM dalam tugas sehari-hari
 - 4) Memahami dan mampu menerapkan pasal-pasal tipiring
 - 5) Memahami dan dapat menangani adanya FKK/PH/AF secara terbatas
 - 6) Memahami dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut PAM TKP, sket dan denah TKP

- 7) Memahami dan dapat melaksanakan kegiatan pencarian pengumpulan dan penyimpanan barang bukti serta mencari saksi-saksi di TKP
 - 8) Memahami dan dapat membawa tahanan dengan prosedur yang benar
- c. Kemampuan penerbitan masyarakat, yang meliputi :
- 1) Memahami dan dapat mengerjakan pengaturan lalu lintas
 - 2) Memahami dan dapat mencegah timbulnya gangguan / penyakit masyarakat
 - 3) Memahami dan dapat melaksanakan kegiatan Dalmas / PHH dengan teknik dan prosedur yang benar
- d. Kemampuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, meliputi :
- 1) Memahami dan dapat memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan
 - 2) Memahami dan dapat memberikan upaya-upaya mengenai siskamling / siskamswakarsa
 - 3) Memahami dan dapat mengerjakan kegiatan penjagaan, patroli dan pengawalan
 - 4) Memahami dan dapat membuat LP / BA (dimaksud dengan menggunakan komputer)

- e. Kemampuan penginderaan dini, meliputi :
- 1) Memahami dan dapat mengamati, mencatat dan melaporkan situasi sosial budaya setempat
 - 2) Memahami dan dapat mengantisipasi secara terbatas jenis-jenis gangguan kamtibmas yang disesuaikan dengan kerawanan daerah
- f. Kemampuan pembinaan kodal, meliputi :
- 1) Memahami dan dapat menggunakan peralatan komlek
 - 2) Mengetahui dan dapat secara terbatas mencari, mencatat, mengumpulkan dan melaporkan data kepada pimpinan
 - 3) Memahami dan dapat menggunakan / merawat alat-alat kesabharan.
- g. Kemampuan administrasi, meliputi :
- 1) Mengerti dan dapat mengetik dan atau mengoperasikan komputer untuk mendukung pelaksanaan tugas
 - 2) Memahami dan dapat mengerjakan prosedur pelaksanaan administrasi serta jukminu polri yang benar
- h. Kemampuan manajemen, yang meliputi :
- 1) Memahami dan dapat mengembangkan kemampuan dasar perorangan
 - 2) Mengerti dan dapat mengelola personel setingkat unit kelompok masyarakat.
 - 3) Mengerti dan dapat menyusun garis besar urutan setiap pelaksanaan tugas.

G. Struktur Organisasi

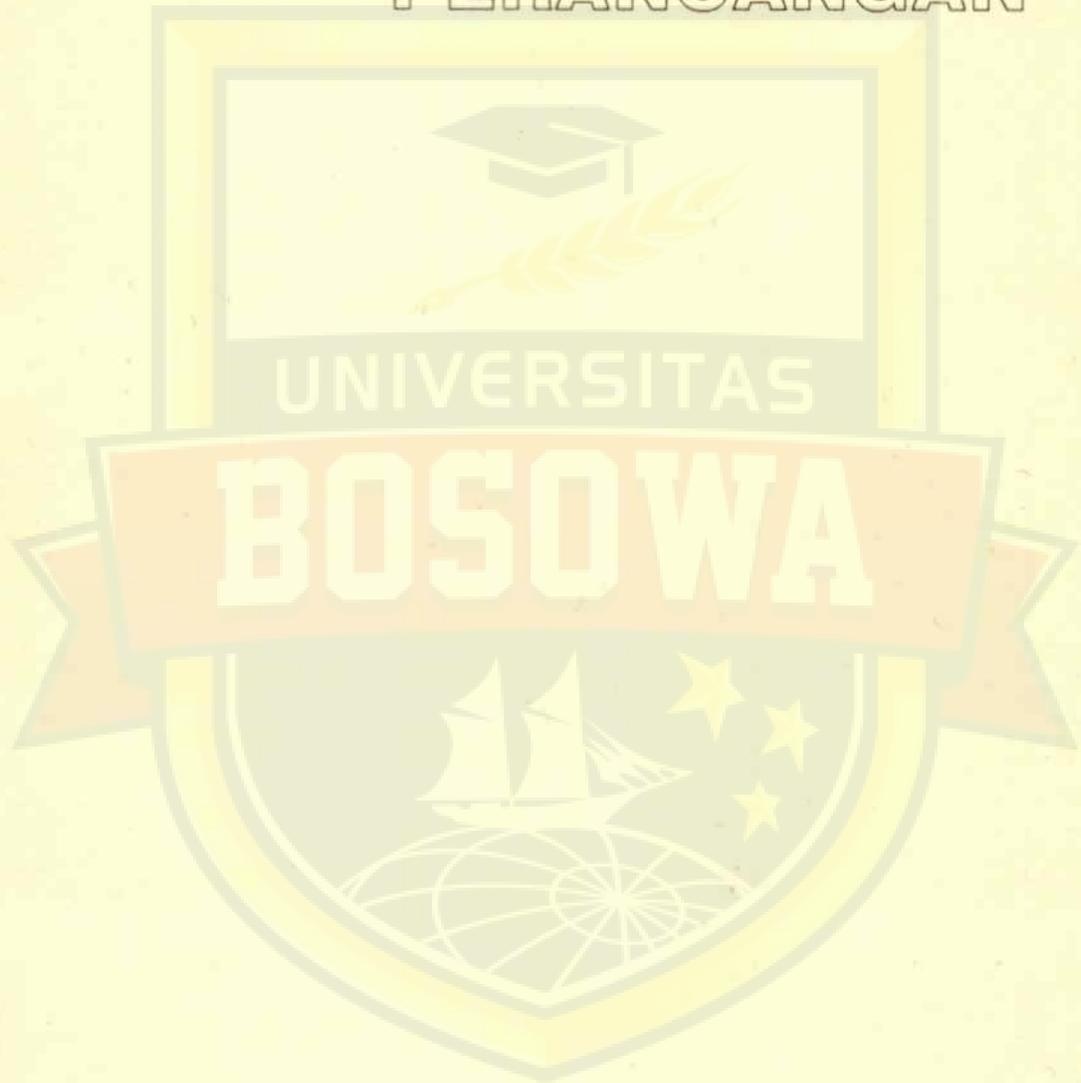


Keterangan :

1. KA. SPN : Kepala SPN
2. SES. SPN : Sekertaris SPN
3. KA. TAUD : Kepala Tata Urusan Dalam
4. URDAL : Urusan Dalam
5. URTU : Urusan Tata Usaha
6. UR. MENAGE : Urusan Dapur/Makanan
7. UR. KOMLEK : Urusan Komunikasi/elektronik
8. BANUM : Bantuan Umum

(Sumber : SPN Batua, Makassar)

BAB IV
KONSEP DASAR
PERANCANGAN



BAB IV

KONSEP DASAR PERANCANGAN

A. Konsep Dasar Fisik Makro

1. Penentuan lokasi

a. Konsep penentuan lokasi

Konsep penentuan lokasi didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Faktor accesibility atau faktor pencapaian, dimaksudkan adalah pencapaian ke lokasi
- 2) Mendukung keberadaan SPN
- 3) Terdapat lahan yang cukup.
- 4) Keadaan daya dukung tanah geografi dan topografi mendukung keberadaan SPN.
- 5) Memungkinkan untuk tempat pendidikan dan latihan

b. Analisa dan penentuan lokasi

KRITERIA PENENTU	ALT A.	ALT B.	ALT C.
1. Dekat dengan Kantor Polisi Daerah Sul-Sel.	2	6	4
2. Luas lahan mencukupi	4	6	4
3. Kemudahan dalam pencapaian	6	6	6
4. Mendukung keadaan sekolah polisi.	4	6	2
5. Memungkinkan untuk area pendidikan	6	6	6
Score	22	30	18

Dari kriteria-kriteria tersebut di atas, maka diperoleh lokasi di Daya (Alternatif B). *Lihat peta* .

Keterangan : 2 = Cukup baik

4 = Baik

6 = Sangat baik

2. Pemilihan site

a. Konsep pendekatan site

Adapun pendekatan site didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Tersedia lahan yang cukup
- 2) Tersedia jalan menuju site
- 3) Keadaan dan daya dukung tanah, topografi dan geografi yang mendukung
- 4) Tersedia utilitas lingkungan yang mendukung keberadaan SPN

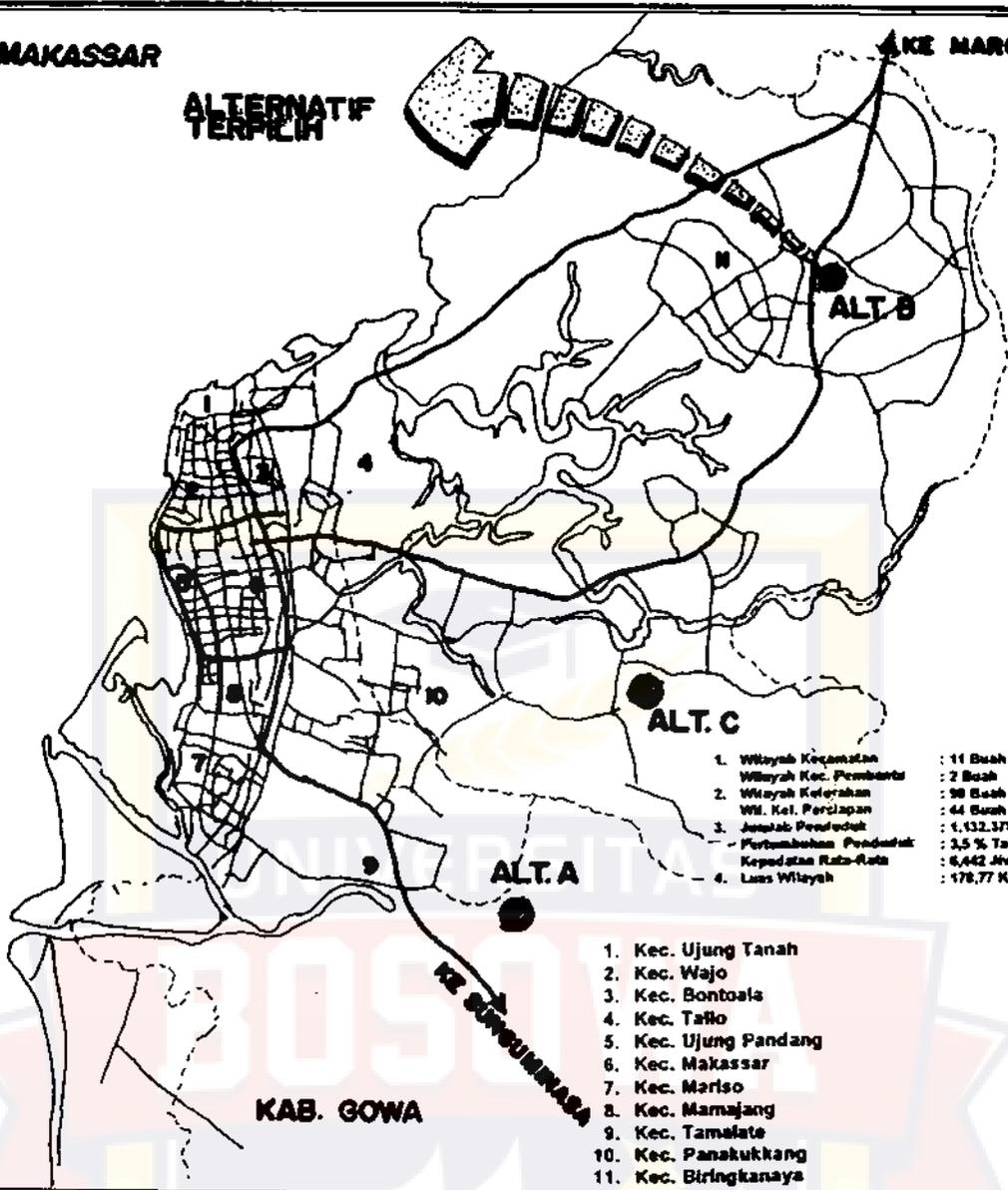
b. Analisa dan penentuan site

KRITERIA PENENTU	ALT A.	ALT B.	ALT C.
1. Pencapaian mudah	6	4	6
2. Keadaan tanah memungkinkan	6	6	2
3. Terdapat, dilalui jaringan listrik, telepon, PAM	6	6	4
4. Tersedia lahan yang cukup	4	6	4
5. Jauh dari keramaian kota	4	6	4
Score	26	28	18

SELAT MAKASSAR

ALTERNATIF TERPILIH

KE. MAROS



- 1. Wilayah Kecamatan : 11 Buah
- Wilayah Kec. Pembanta : 2 Buah
- 2. Wilayah Kelurahan : 98 Buah
- Wil. Kel. Perclapan : 44 Buah
- 3. Jumlah Penduduk : 1.132.378 jiwa
- Pertumbuhan Penduduk : 3,5 % Tahun
- Kepadatan Rata-Rata : 6,442 jiwa/KM2
- 4. Luas Wilayah : 178,77 KM2

- 1. Kec. Ujung Tanah
- 2. Kec. Wajo
- 3. Kec. Bontol
- 4. Kec. Tallo
- 5. Kec. Ujung Pandang
- 6. Kec. Makassar
- 7. Kec. Mariso
- 8. Kec. Mamajang
- 9. Kec. Tamalate
- 10. Kec. Panakukkang
- 11. Kec. Biringkanaya

KAB. GOWA

KE. SUNDEWANA

NAMA GAMBAR :

LEGENDA :

- BATAS KECAMATAN
- SUNGAI
- LAUT
- JALAN

U



Skala

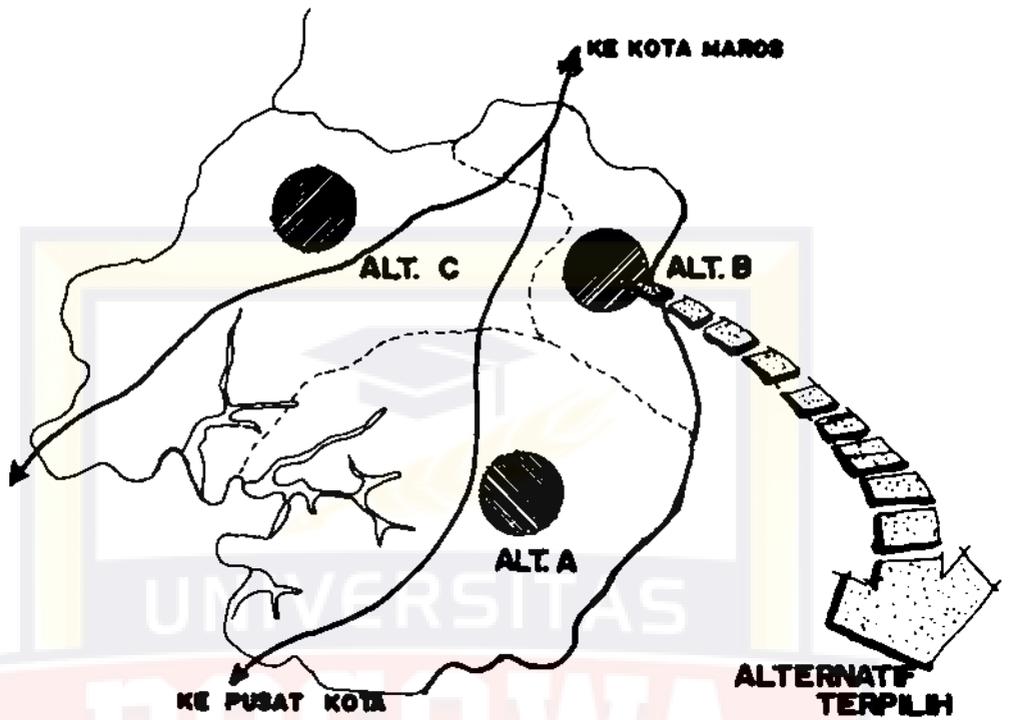
0 2 4km

NO GAMBAR :

1

JUDUL T.A.

KAB. MAROS



LEGENDA :

-  BATAS KECAMATAN
-  SUNGAI
-  JALAN

U



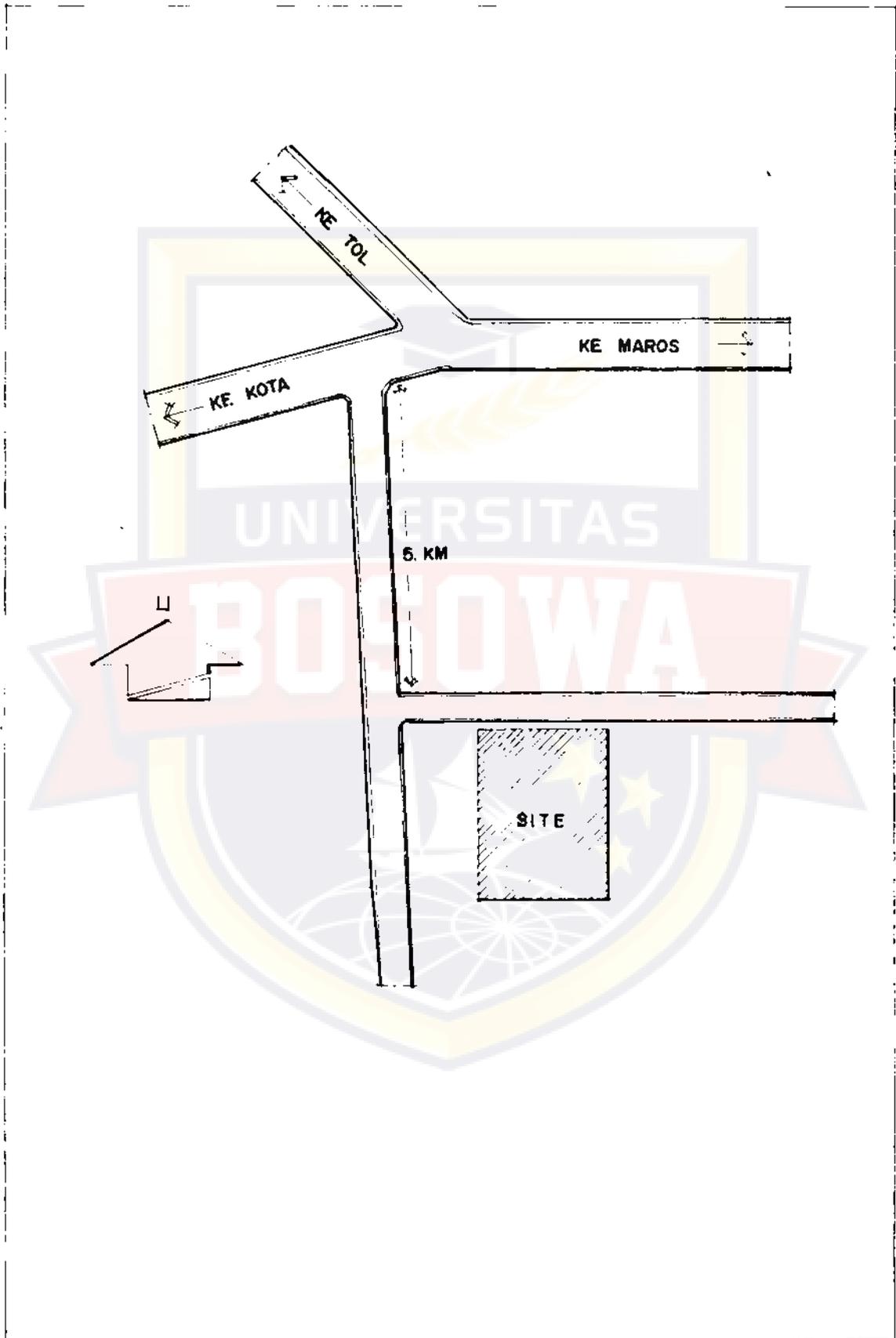
Skala



NO GAMBAR :

2

JUDUL T.A.



Dari kriteria penentu tersebut diatas, maka site yang terpilih adalah : alternatif B

Keterangan : 2 = Cukup baik

4 = Baik

6 = Sangat baik

3. Ungkapan kegiatan

Ungkapan dimaksud untuk mengelompokkan beberapa bagian dalam suatu wadah tertentu yang didasarkan atas jenis pelaku, sifat dan karakter kegiatan, sehingga tiap kegiatan tidak saling mengganggu, selain itu pada perencanaannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pencapaian yang efektif
- b) Tingkat kebisingan
- c) Keadaan topografi
- d) Dapat memanfaatkan potensi alam
- e) Orientasi terhadap view yang baik
- f) Kegiatan yang tidak mengganggu

a. Macam kegiatan

- 1) Berdasarkan tempat berlangsungnya kegiatan dibedakan atas aktifitas yang dilakukan di ruangan, maupun tempat latihan dengan memperhatikan kegiatan penunjang, misalnya dari tempat latihan tidak langsung masuk ke dalam ruangan, tetapi ketempat istirahat terlebih dahulu.

2) Berdasarkan jenis pelaku dibagi atas

a) kegiatan pengelola

Kegiatan pengelola seperti menyiapkan dan mengatur kegiatan, pelaksanaan proses belajar mengajar dan latihan berdasarkan petunjuk pelaksanaan polri.

b) kegiatan service

Segala kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan.

c) kegiatan siswa

Segala kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan latihan kepolisian.

3) Berdasarkan uraian kegiatan tersebut pelaku dapat dikelompokkan :

a) Zone kegiatan pengelola dan service tidak berhubungan langsung, hubungan antara keduanya sifatnya hanyalah pengawasan, sehingga dalam perencanaan tidak harus berdekatan secara jelas.

b) Zone kegiatan pengelola dan siswa tidak saling berhubungan secara langsung, sehingga perletakannya tidak harus berdekatan secara nyata / jelas.

c) Zone siswa dengan service ada hubungan, sehingga dalam perencanaannya berdekatan dan nyata / jelas.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa zone pengelola tidak harus berdekatan dengan kedua zone lainnya karena pengelola tidak berhubungan dengan kegiatan latihan, sedangkan zone service ada hubungan.

b. Personingan

Personingan disini adalah pengelompokan beberapa kegiatan dalam suatu zone tertentu sesuai dengan sifat kegiatan dan persyaratan secara garis besar.

4. Konsep tata massa

a. Dasar pertimbangan

- 1) Pemisahan massa berdasarkan identifikasi kegiatan
- 2) Hal yang tercipta dari komposisi massa secara keseluruhan

b. Kriteria

- 1) Mencerminkan suasana pendidikan dan latihan yang berorientasi kepada kedisiplinan yang tinggi.
- 2) Pemisahan massa berdasarkan atas jenis aktifitas yang berbeda sifat kegiatannya.
- 3) Terciptanya pemisahan sehingga masing-masing kegiatan tidak terganggu.
- 4) Pencapaian mudah, efektif dan efisien.

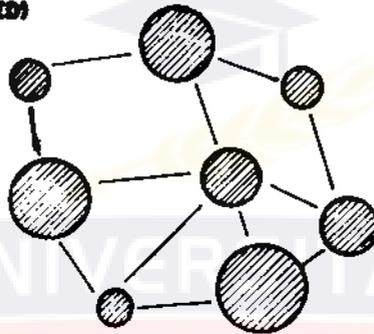
c. Alternatif komposisi massa

- 1) Komposisi massa padat (compact)
 - a) Suasana pendidikan dan latihan tidak sepenuhnya dapat tercipta
 - b) Pemisahan massa dengan aktifitas yang berbeda kurang jelas
 - c) Ruang terbuka relatif lebih kecil
 - d) Pencapaian lebih mudah dan efisien

2) Komposisi massa tersebar (scattered)

- a) Suasana yang tercipta relatif baik
- b) Pemisahan dengan aktifitas yang berbeda lebih jelas
- c) Masing-masing kegiatan tidak saling mengganggu
- d) Pencapaian kurang jelas

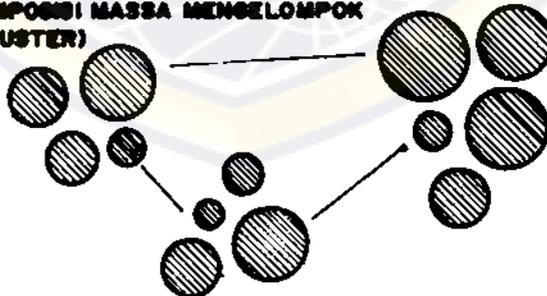
**KOMPOSISI MASSA TERSEBAR
(SCATTERED)**



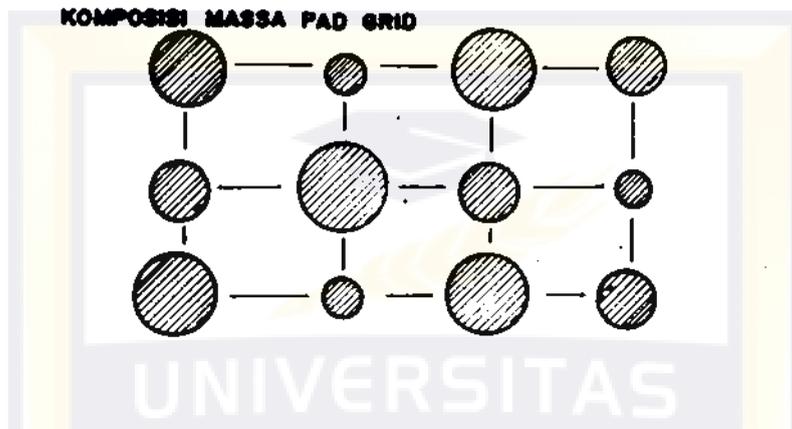
3) Komposisi massa mengelompok (cluster)

- a) Suasana yang tercipta relatif, semi formil
- b) Pemisahan yang berbeda aktifitas jelas
- c) Pencapaian cukup relatif

**KOMPOSISI MASSA MENGELOMPOK
(CLUSTER)**

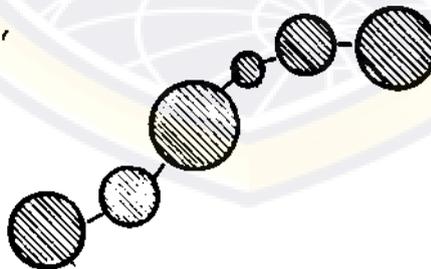


- 4) Komposisi massa pad grid
- a) Kesan tercipta formil teratur
 - b) Pemisahan aktifitas tidak jelas
 - c) Pencapaian agak efektif

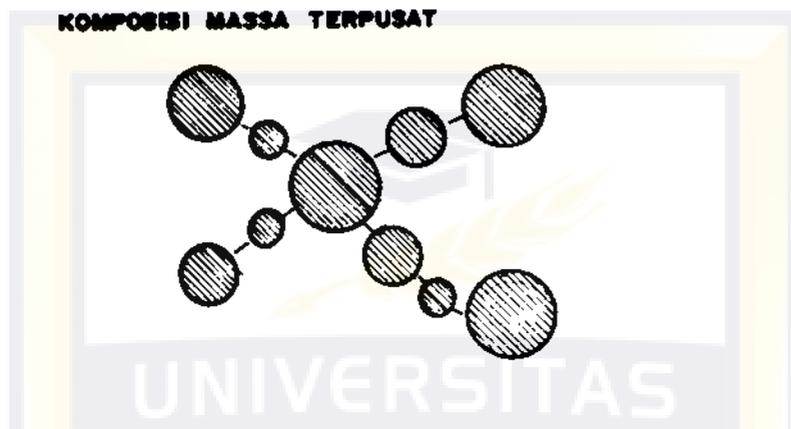


- 5) Komposisi massa linier
- a) Suasana tercipta monoton
 - b) Pemisahan aktifitas yang berbeda jelas
 - c) Pencapaian kurang efektif

KOMPOSISI MASSA LINIER



- 6) Komposisi massa terpusat (radial)
- a) Kesan tercipta rekreatif, semi formal
 - b) Pemisahan massa yang beraktifitas kurang jelas
 - c) Pencapaian efektif mudah



Dengan melihat kriteria-kriteria dari alternatif di atas maka yang dapat dikembangkan pada SPN dengan tidak melupakan keadaan Site di sekelilingnya, adalah komposisi massa pad grid dengan menyesuaikan bentuk terhadap pola fisik site yang ada.

5. Konsep ruang luar

Pengelolaan ruang luar (landsecap) didasarkan pada pertimbangan :

- a. Menciptakan suasana pendidikan dan latihan yang berkesan kedisiplinan yang tinggi serta berwibawa
- b. Menciptakan ekspresi, penampilan bangunan
- c. Mampu menetralsir pengaruh luar
- d. Pola sirkulasi dan arah pandang yang baik

Elemen fisik ruang luar antara lain :

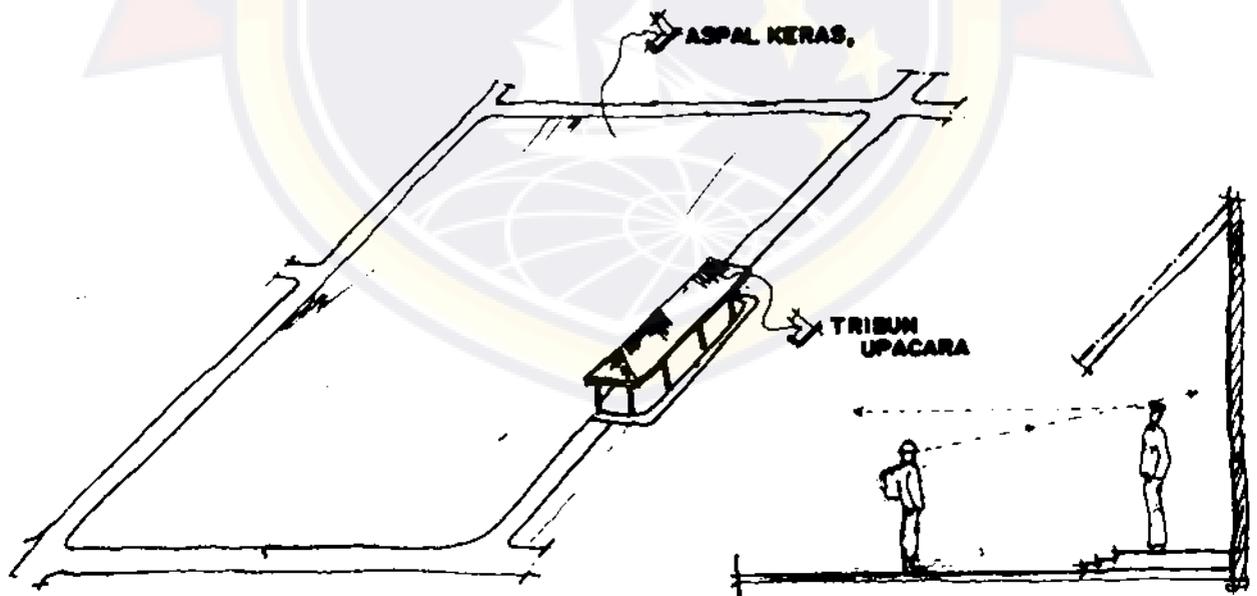
a. Gerbang entrance

Merupakan elemen ruang luar yang pertama dilihat, disaksikan oleh halayak ramai, terletak di jalan utama, karenanya harus dapat mencerminkan atau memberi kesan tempat pendidikan dan latihan kepolisian negara yang berdisiplin tinggi dan berwibawa

b. Lapangan

1) Lapangan hitam

Lapangan hitam, lapangan untuk latihan baris-berbaris yang terbuat dari aspal keras dan padat, selain untuk tempat latihan baris-berbaris lapangan ini juga digunakan untuk tempat upacara, apel siswa dan anggota polri yang bertugas di SPN .



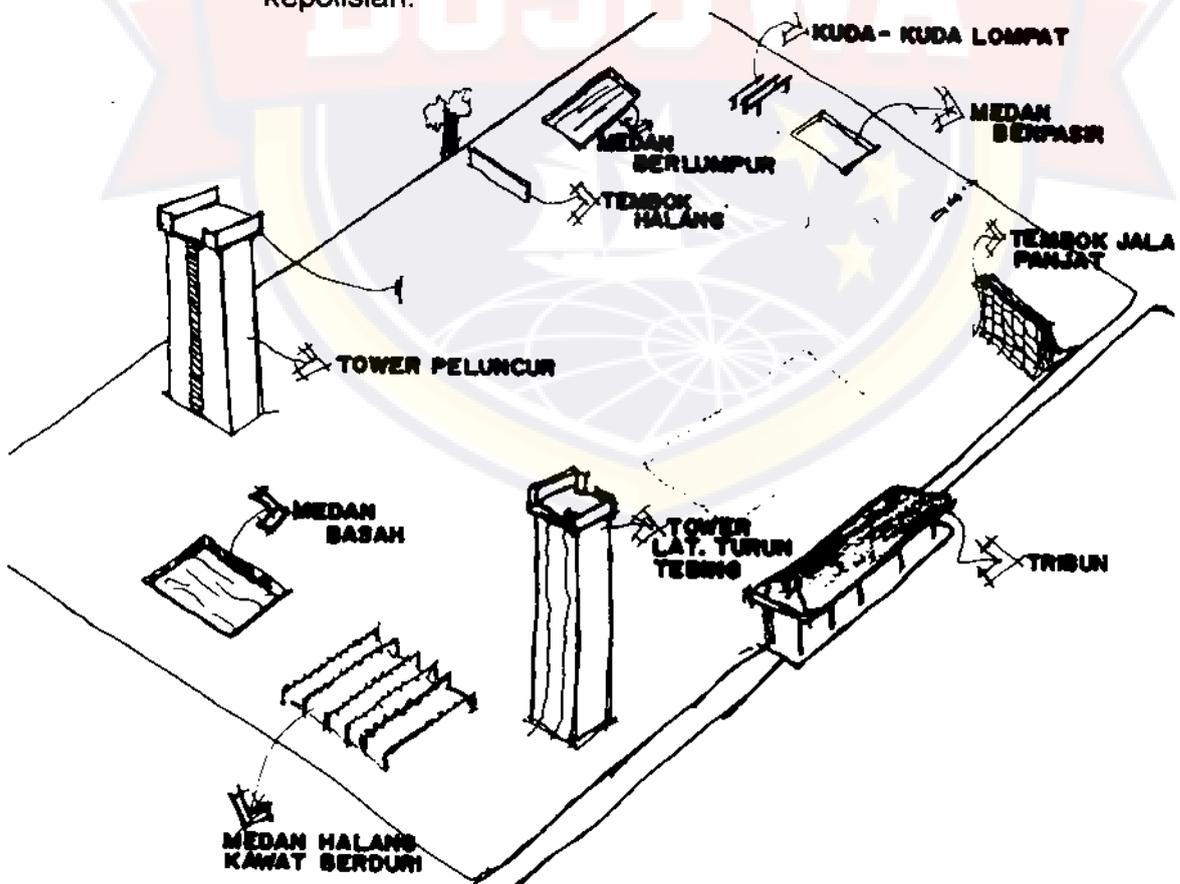
LAPANGAN HITAM

2) Lapangan hijau

Lapangan hijau atau lebih dikenal dengan lapangan rumput, digunakan sebagai tempat latihan fisik dan olahraga. Lapangan ini harus cukup luas dan dapat menampung siswa yang melaksanakan pendidikan.

3) Tempat latihan

Tempat latihan terdiri dari area yang luas dimana sudah dilengkapi dan dipasang tanda-tanda serta alat-alat latihan yang memungkinkan untuk tempat latihan fisik dan mental, dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai medan sesungguhnya dengan faktor kesulitan yang cukup tinggi sesuai dengan aturan-aturan dan syarat-syarat dari kepolisian.



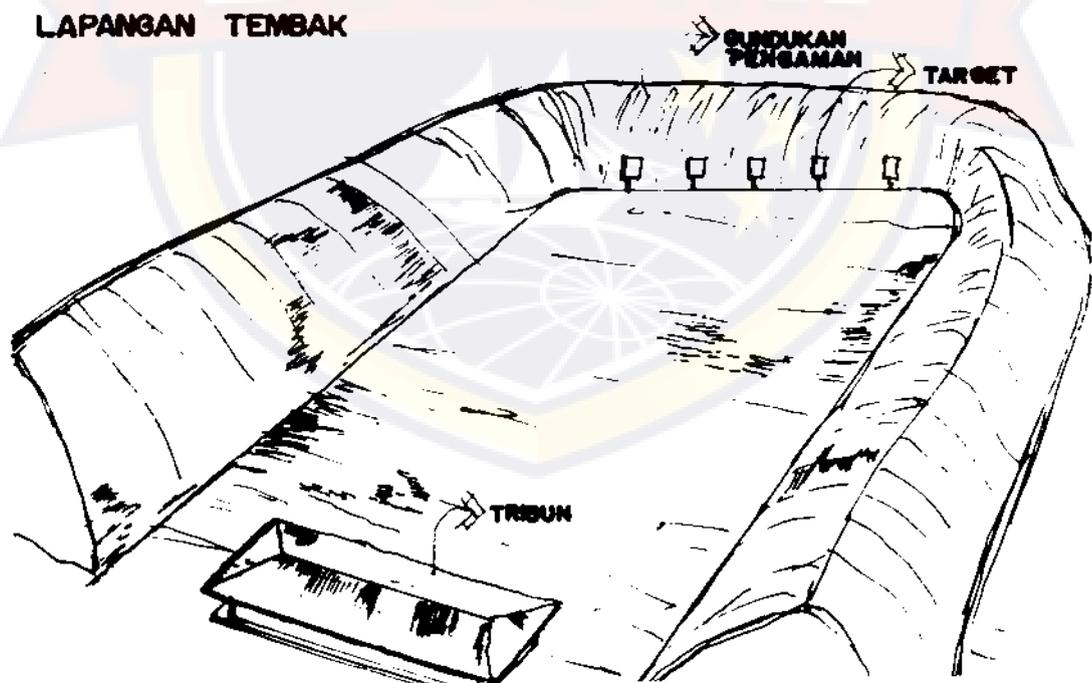
4) Lapangan tembak

Lapangan tembak digunakan sebagai tempat latihan menembak bagi para siswa, maupun anggota kepolisian.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah :

- a) Kenyamanan dan kestabilan menembak
- b) Keadaan setempat dan arah angin
- c) Situasi aman dan terjamin
- d) Tingkat kebisingan rendah, dapat meredam bunyi
- e) Sesuai dengan kriteria-kriteria Kepolisian

Selain dari itu tempat harus aman dari jangkauan masyarakat umum.



5) Taman

Merupakan tempat yang ditata secara baik, dan terkesan sehat serta dapat memberikan kesejukan, bersahabat dengan lingkungan setempat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) bersih**
- b) rapih**
- c) indah**
- d) sejuk**
- e) nyaman**
- f) aman**

6) Parkir

Area parkir digunakan untuk kendaraan-kendaraan dinas dan kendaraan umum, area parkir harus berada didekat pintu masuk, atau paling tidak mudah dijangkau, untuk kendaraan dinas yang digunakan mengangkut siswa atau untuk keperluan SPN mempunyai tempat parkir terpisah dari tempat parkir umum.

7) Area olah raga

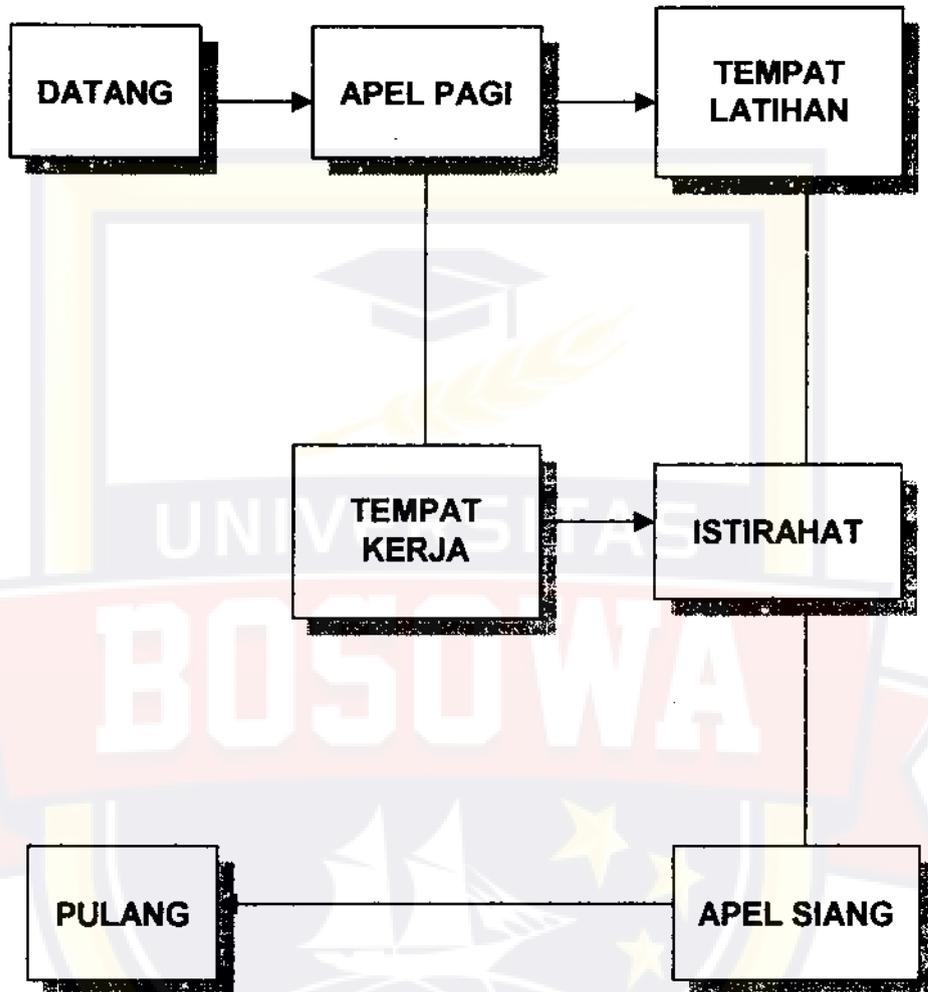
Area olahraga terdiri dari :

- a) Lapangan sepak bola**
- b) Lapangan bola volly**
- c) Lapangan tennis**
- d) Lapangan bola basket**
- e) Kolam renang**

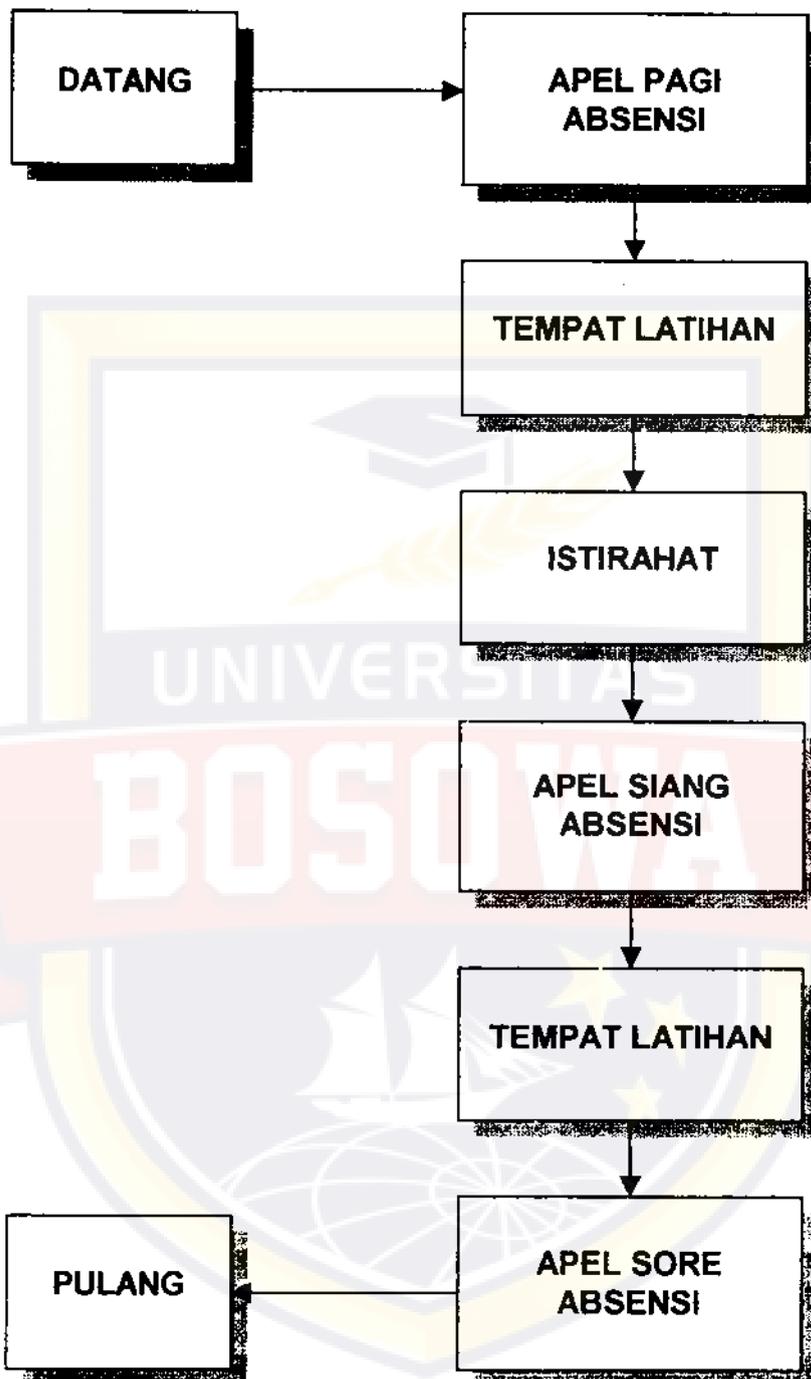
B. Konsep Dasar Fisik Mikro

1. Konsep pola kegiatan

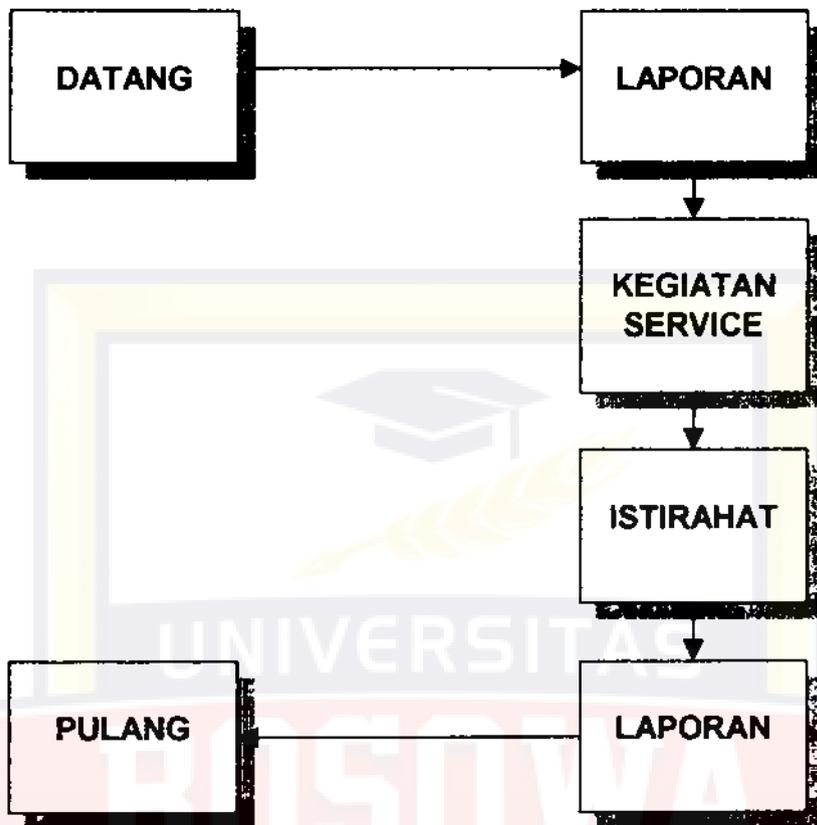
a. Pengelola



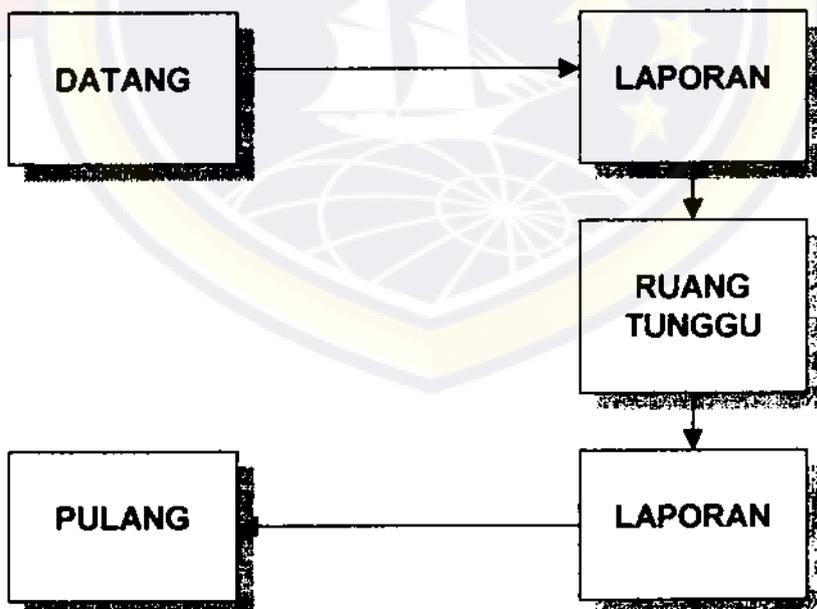
b. Siswa pendidikan



c. Service



d. Pengunjung



2. Konsep kebutuhan ruang

Kebutuhan jenis ruang dalam SPN adalah sebagai berikut :

a. Ruang Pengelola

- 1) Ruang KSPN (Kepala Sekolah Polisi Negara)
- 2) Ruang administrasi
- 3) Ruang urusan latihan (urtu)
- 4) Ruang kepala urusan pengajaran
- 5) Ruang gadik (tenaga pendidik)
- 6) Ruang korsis (kepala korps siswa)
- 7) Ruang kaopsjarlat (kepala operasional dan pengajaran dan latihan)
- 8) Ruang bindik (pembina administrasi)
- 9) Ruang taud (tata urusan dalam)
- 10) Ruang puskodal (pusat pengelolaan)
- 11) Ruang bayangkari

b. Ruang penjagaan

- 1) Ruang provots
- 2) Ruang piket
- 3) Pos penjagaan

c. Ruang latihan ruang terbuka

- 1) Tribun upacara
- 2) Lapangan hitam
- 3) Lapangan hijau
- 4) Lapangan latihan
- 5) Lapangan menembak

d. Ruang latihan tertutup

- 1) Gor (gelanggang olahraga)
- 2) Kolam renang

e. Ruang pengajaran

- 1) Ruang laboratorium bahasa
- 2) Ruang komputer
- 3) Baruga
- 4) Perpustakaan

f. Ruang penunjang

- 1) Aula
- 2) Poliklinik
- 3) Asrama siswa
- 4) Asrama instruktur
- 5) Ruang makan siswa
- 6) Koperasi

g. Ruang penyimpanan / perbekalan

- 1) Gudang perlengkapan
- 2) Gudang senjata
- 3) Gudang logistik
- 4) Dapur umum
- 5) Garasi mobil

h. Ruang olahraga

- 1) Lapangan sepak bola
- 2) Lapangan bola volly
- 3) Lapangan tenis
- 4) Lapangan bola basket

i. Fasilitas

- 1) Masjid
- 2) Kantin
- 3) Area parkir

3. Konsep besaran ruang

Konsep besaran ruang pada SPN (SPN) Makassar adalah sebagai berikut :

a. Ruang pengelola

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1) Ruang KSPN | = 20 m ² |
| 2) Ruang administrasi dengan asumsi | = 80 m ² |
| 3) Ruang urusan latihan | = 32 m ² |
| 4) Ruang kepala urusan pengajaran | = 32 m ² |

5) Ruang tenaga pendidik	=	80 m ²
6) Ruang korsis	=	32 m ²
7) Ruang kaopsjarlat	=	32 m ²
8) Ruang bindik	=	32 m ²
9) Ruang taud	=	32 m ²
10) Ruang puskodak	=	32 m ²
11) Ruang bayangkari	=	32 m ²
		<hr/>
Total	=	436 m ²

b. Ruangan penjagaan

1) Ruang provost	=	50 m ²
2) Ruang piket	=	50 m ²
3) Pos penjagaan 2 org diasumsi	=	6 m ²
		<hr/>
Total	=	122 m ²

c. Ruang latihan terbuka

1) Tribun upacara diasumsikan	=	60 m ²
2) Lapangan hitam diasumsikan	=	9.600 m ²
3) Lapangan hijau diasumsikan	=	12.000 m ²
4) Lapangan latihan diasumsikan	=	18.000 m ²
5) Lapangan menembak diasumsikan	=	2.500 m ²
		<hr/>
Total	=	42.160 m ²

d. Ruang latihan tertutup

1) Gor (gelanggang olahraga)

Diasumsikan = 1.250 m²

2) Kolam renang

Diasumsikan = 1.250 m²

Total = 2.500 m²

e. Ruang pengajaran

1) Ruang laboratorium bahasa = 80 m²

2) Ruang komputer = 80 m²

3) Baruga diasumsikan = 200 m²

4) Perpustakaan = 180 m²

Total = 540 m²

f. Ruang penunjang

1) Aula diasumsikan = 375 m²

2) Poliklinik diasumsikan = 80 m²

3) Asrama siswa terbagi atas 1 barak menampung 100 siswa

jadi, (6,2m x 41,25 m) 15 barak = 3.836,25 m²

ditambah dengan 1 ruang belajar pada masing-masing

barak, 100 x 1,40 m = 140 m² x 15 Barak = 2.100 m²

3.836,25 m² + 2.100 m² = 5.936,25 m²

Jadi total asrama siswa adalah = 5.936,25 m²

4) Asrama instruktur terbagai atas

- Rumah tamtama dan bintara

$$90 \text{ Unit} \times 36 \text{ m}^2 = 2.880 \text{ m}^2$$

- Rumah perwira 60 unit x 45 m² = 2.700 m²

- Rumah pimpinan/ wakil 2 unit x 70 m² = 150 m²

5) Ruang makan siswa dibagi menjadi 5 ruang

1 ruang menampung 300 siswa

$$\text{jadi 1 ruang } 8 \text{ m} \times 31,5 \text{ m} = 252 \text{ m}^2 \times 5 \text{ ruang} = 1260 \text{ m}^2$$

Total = 13.371 m²

g. Ruang penyimpanan, perbekalan

1) Gudang perlengkapan

diasumsikan = 150 m²

2) Gudang senjata = 64 m²

3) Gudang logistik = 80 m²

4) Dapur umum = 300 m²

5) Garasi mobil 28 m² / 1 mobil truk x 10 mobil = 280 m²

Total = 874 m²

h. Ruang olahraga

1) Lapangan sepak bola = 1.200 m²

2) Lapangan bola volly = 342 m²

3) Lapangan tenis = 300 m²

4) lapangan bola basket = 450 m²

Total = 2.292 m²

i. Fasilitas

1) Mesjid	=	300 m ²
2) Kantin	=	120 m ²
3) Area parkir diasumsikan	=	400 m ²
4) Ruang mekanikal elektrik	=	20 m ²
		<hr/>
Total	=	840 m ²

Perhitungan besaran ruang berdasarkan kapasitas yang ditampung dari masing-masing fasilitas dengan asumsi yang mengacu pada :

- Data Arsitek (*Neufert : 1996*)
- Building Planning and desain standart (*Sleeper : - 95*)
- Asumsi berdasarkan pengamatan dilapangan ruang dan jenis.

Rekapitulasi

a. Ruang pengelola	=	436 m ²
b. Ruang penjagaan	=	122 m ²
c. Ruang latihan terbuka	=	42.160 m ²
d. Ruang tertutup	=	2.500 m ²
e. Ruang pengajaran	=	540 m ²
f. Ruang penunjang	=	13.371 m ²
g. Ruang penyimpanan	=	874 m ²
h. Ruang olahraga	=	2.292 m ²
i. Fasilitas pelengkap	=	840 m ²
		<hr/>
Total	=	63.135 m ²

Building Coverage (BC) = 63.135 m²

BC : OS (Open Space) = 40 % : 60 %

OS = 60 / 40 x 63.135 m² = 94.702,5 m²

Luas lahan yang dibutuhkan adalah :

63.135 + 94.702,5 = 157.837,5 m² ~ 15,78 Ha

dibulatkan = 15,8 Ha.

4. Konsep hubungan ruang

a. Hubungan jenis ruang secara umum

NO.	JENIS RUANG
1.	Ruang pengelola
2.	Ruang penjagaan
3.	Ruang latihan terbuka
4.	Ruang latihan tertutup
5.	Ruang pengajaran
6.	Ruang penunjang
7.	Ruang penyimpanan perbekalan
8.	Ruang olah raga
9.	Fasilitas pelengkap

Keterangan :

○ = tidak ada hubungan

○ = ada hubungan

○ = hubungan erat

b. Ruang pengelola

NO.	JENIS RUANG
1.	Ruang KSPN
2.	Ruang administrasi
3.	Ruang urtu
4.	Ruang KUP
5.	Ruang gadik
6.	Ruang korsis
7.	Ruang kaopsjarlat
8.	Ruang bindik
9.	Ruang taud
10.	Ruang puskodal
11.	Ruang bayangkari

Keterangan:

- = tidak ada hubungan
- = ada hubungan
- = hubungan erat

c. Ruang penjagaan

NO.	JENIS RUANG
1.	Ruang provost
2.	Ruang piket
3.	Ruang penjagaan

Keterangan :

- = tidak ada hubungan
- = ada hubungan
- = hubungan erat

d. Ruang latihan terbuka

NO.	JENIS RUANG
1.	Tribun upacara
2.	Lapangan hitam
3.	Lapangan hijau
4.	Lapangan latihan
5.	Lapangan menembak

Keterangan :

- = tidak ada hubungan
- = ada hubungan
- = hubungan erat

e. Ruang latihan tertutup

NO.	JENIS RUANG
1.	GOR
2.	Kolam renang

Keterangan :

- = tidak ada hubungan
- = ada hubungan
- = hubungan erat

f. Ruang pengajaran

NO.	JENIS RUANG
1.	Ruang lab. bahasa
2.	Ruang komputer
3.	Baruga

Keterangan :

- = tidak ada hubungan
- = ada hubungan
- = hubungan erat

g. Ruang penunjang

NO.	JENIS RUANG
1.	Aula
2.	Poliklinik
3.	Asrama mahasiswa
4.	Asrama Instruktur
5.	Ruang makan siswa
6.	Koperasi

Keterangan :

○ = tidak ada hubungan

○ = ada hubungan

○ = hubungan erat

h. Ruang penyimpanan perbekalan

NO.	JENIS RUANG
1.	Gudang perlengkapan
2.	Gudang senjata
3.	Gudang logistik
4.	Dapur umum
5.	Garasi mobil

Keterangan :

○ = tidak ada hubungan

○ = ada hubungan

○ = hubungan erat

i. Ruang olahraga

NO.	JENIS RUANG
1.	Lapangan sepak bola
2.	Lapangan bola volley
3.	Lapangan tenis
4.	Lapangan bola basket

Keterangan :

○ = tidak ada hubungan

○ = ada hubungan

○ = hubungan erat

j. Fasilitas

NO.	JENIS RUANG
1.	Mesjid
2.	Kantin
3.	Area parkir
4.	Ruang ME

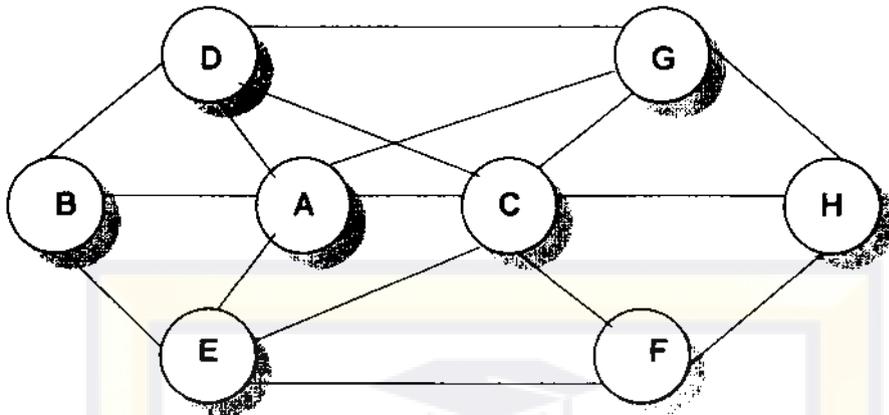
Keterangan :

○ = tidak ada hubungan

○ = ada hubungan

○ = hubungan erat

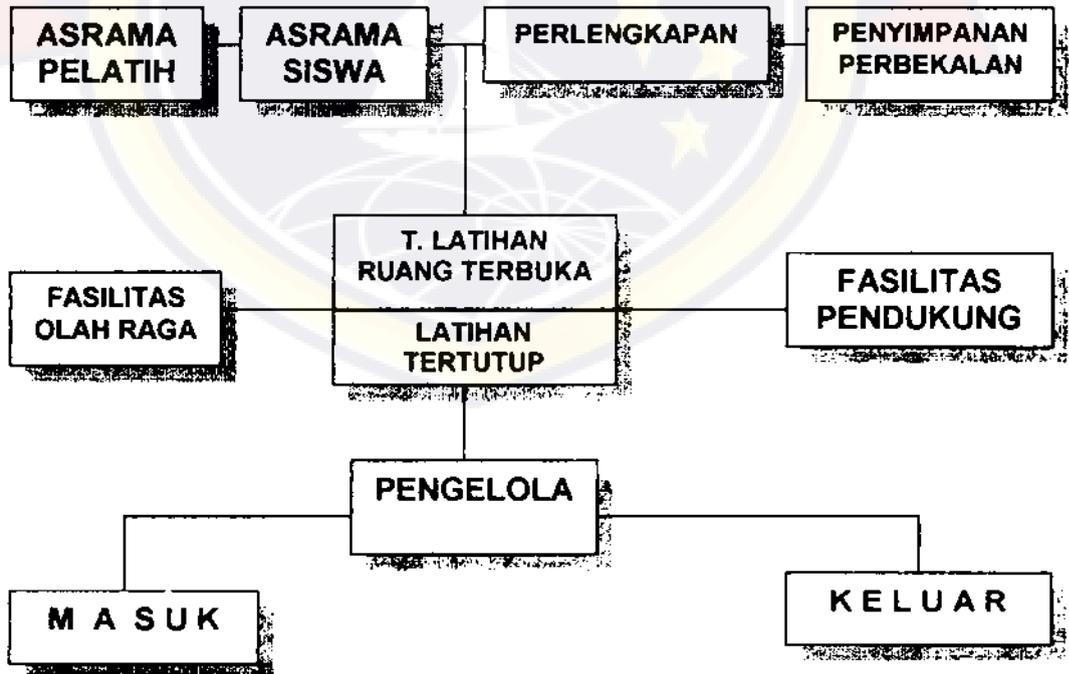
Interaction Net



Keterangan :

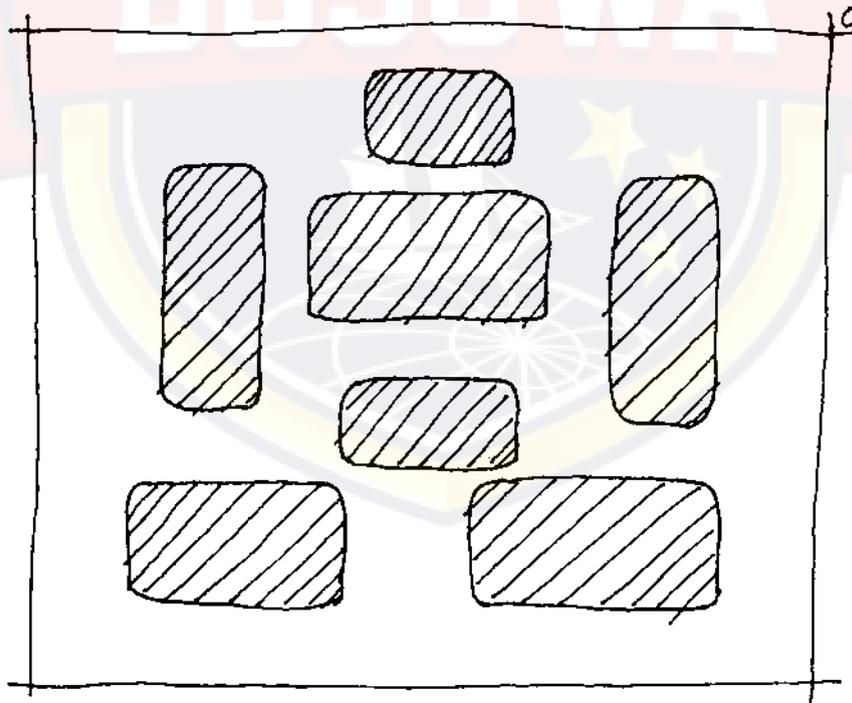
- A = ruang pengelola E = ruang penunjang
- B = ruang penjagaan F = ruang penyimpanan
- C = ruang latihan tertutup G = ruang olahraga
- D = ruang pengajaran H = fasilitas

5. Struktur sistem organisasi ruang



6. Konsep penampilan bangunan

Penampilan bangunan direncanakan dari bentuk dasar massa dengan pola persegi empat, yang memudahkan dalam hal desain tata massa dan penentuan ruang yang efisien sebagai bangunan pendidikan dan latihan, serta didasari atas karakter kepolisian yang berdisiplin tinggi dan berwibawa, memiliki jiwa kesatria merupakan dasar pertimbangan dalam konsep penampilan bangunan dengan tetap mempertimbangkan segi arstektural yang dipadukan dengan bentuk lain pada beberapa bagian untuk mendapatkan kesan dinamis dan balance. Kesan terbuka dan disiplin yang tinggi diungkapkan dengan penataan dan penggunaan material yang sesuai.



7. Konsep struktur dan konstruksi

a. Struktur

Struktur dari segi arsitektur adalah penjelmaan ekspresi (external expression) yang memenuhi suatu fungsi dalam (internal function) dengan tepat sehingga akan menghasilkan hasil yang baik.

1) Pertimbangan

- a) Sistem struktur disesuaikan dengan karakteristik bangunan
- b) Bersifat fleksibel (kemungkinan pengembangan)
- c) Bangunan-bangunan yang ada termasuk dalam kualifikasi struktur menengah

2) Persyaratan-persyaratan pokok dalam struktur.

- a) Keseimbangan, agar bangunan atau bagiannya tidak bergerak
- b) Kestabilan agar komponen-komponen bangunan tidak goyah oleh gaya luar
- c) Kekuatan, hubungan antara satu dengan yang lain dari struktur merupakan satu kekuatan dalam menerima pengaruh dari segala macam pembebanan
- d) Fungsional, yaitu memenuhi fungsi dan pembentukan ruang yang diinginkan

- e) Ekonomis, merupakan batasan utama dalam pemilihan struktur
- f) Estetika, yang mana struktur merupakan bagian integral dengan ekspresi arsitektur yang ingin dicapai

3) Jenis-jenis struktur yang dipilih

a) Struktur rangka

Pada prinsipnya menggunakan balok dan kolom sebagai pemikul beban. Sistem ini dipakai untuk bentangan besar dan lebar

b) Sistem dinding

Sistem ini menggunakan bahan bata dan beton sebagai pemikul beban

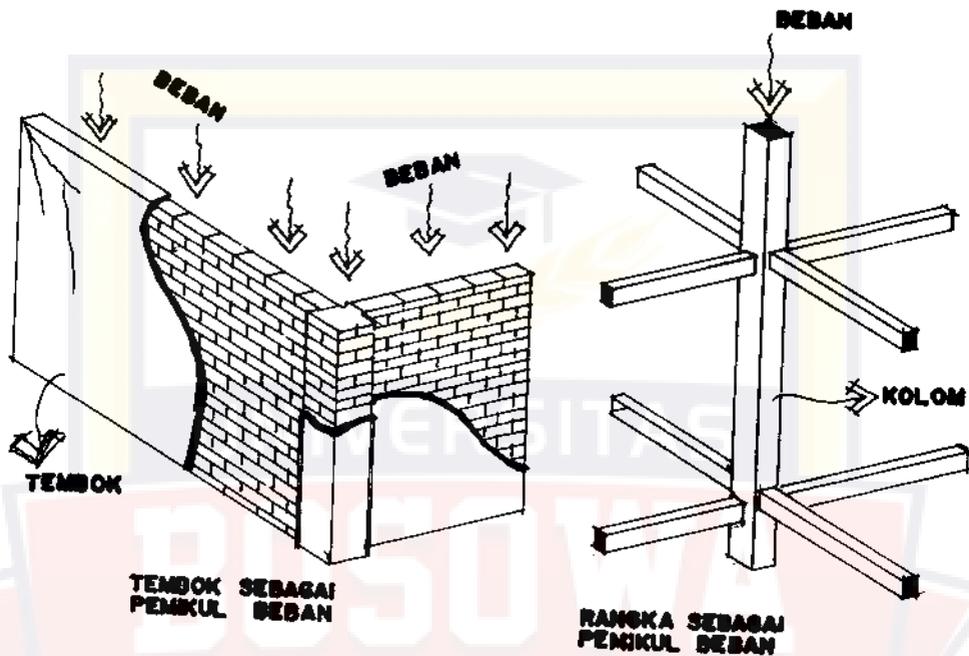
c) Sistem kombinasi antara bata, beton dan rangka

b. Konstruksi

Dalam memilih konstruksi harus memperhatikan beberapa faktor antara lain :

- 1) Bahan murah dan mudah diperoleh
- 2) Pemeliharaan sederhana dan mudah
- 3) Pelaksanaanya mudah
- 4) Tahan terhadap pengaruh cuaca
- 5) Sesuai dengan Fungsi bangunan

- 6) Atas dasar pertimbangan tersebut, maka konstruksi gabungan antara konstruksi rangka dengan konstruksi beton.



c. Bahan

- 1) Disesuaikan dengan sistem struktur yang digunakan
- 2) Penyesuaian bahan dengan kondisi dimana sistem struktur digunakan .
- 3) Mudah perawatannya / pemeliharanya.
- 4) Sebanyak mungkin menggunakan bahan lokal

- 5) Faktor keamanan yaitu kekuatan bahan terhadap gaya-gaya yang bekerja.
- 6) Kesesuaian antara fungsi dan karakter bangunan.
- 7) Cocok untuk digunakan pada fasilitas pendidikan dan latihan maupun umum.
- 8) Awet terhadap pengaruh cuaca dan binatang-binatang perusak dalam jangka waktu lama
- 9) Dan hal-hal lainnya yang dapat mendukung kualitas bahan yang digunakan

C. Sistem Environment dan Kelengkapan Bangunan (Service Engineering)

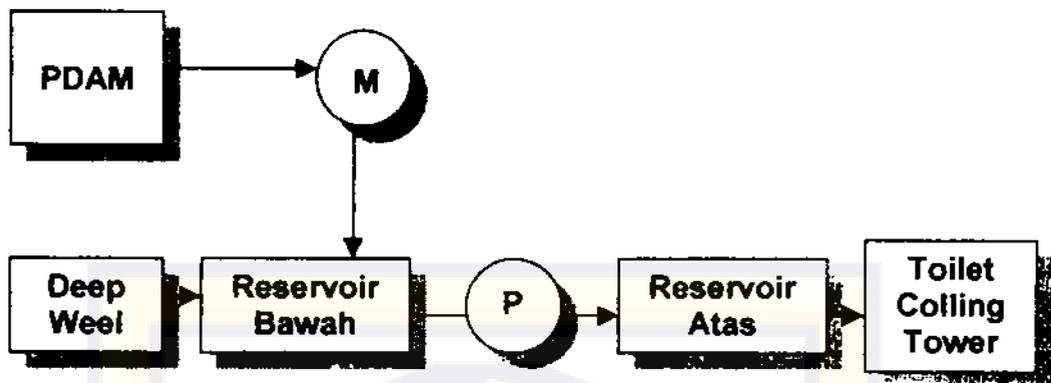
1. Pengadaan air bersih

Sumber air bersih berasal dari PDAM, sedangkan untuk cadangan disediakan sumur artesis. Sistem pengadaan air bersih dilakukan dengan pertimbangan :

- a. kontinuitas penyaluran air setiap hari
- b. pendistribusian yang merata ke seluruh bagian bangunan
- c. pemanfaatan air untuk penanggulangan bahaya kebakaran

Berdasarkan pertimbangan tersebut air mula-mula ditampung pada reservoir bawah untuk kemudian dinaikkan ke reservoir atas dengan bantuan pompa dan selanjutnya didistribusikan ke bagian-bagian bangunan yang membutuhkan.

Diagram Sistem Pengadaan Air Bersih



2. Sistem pembuangan

a. Pembuangan air hujan

Pembuangan air hujan melalui saluran terbuka

b. Pembuangan air kotor

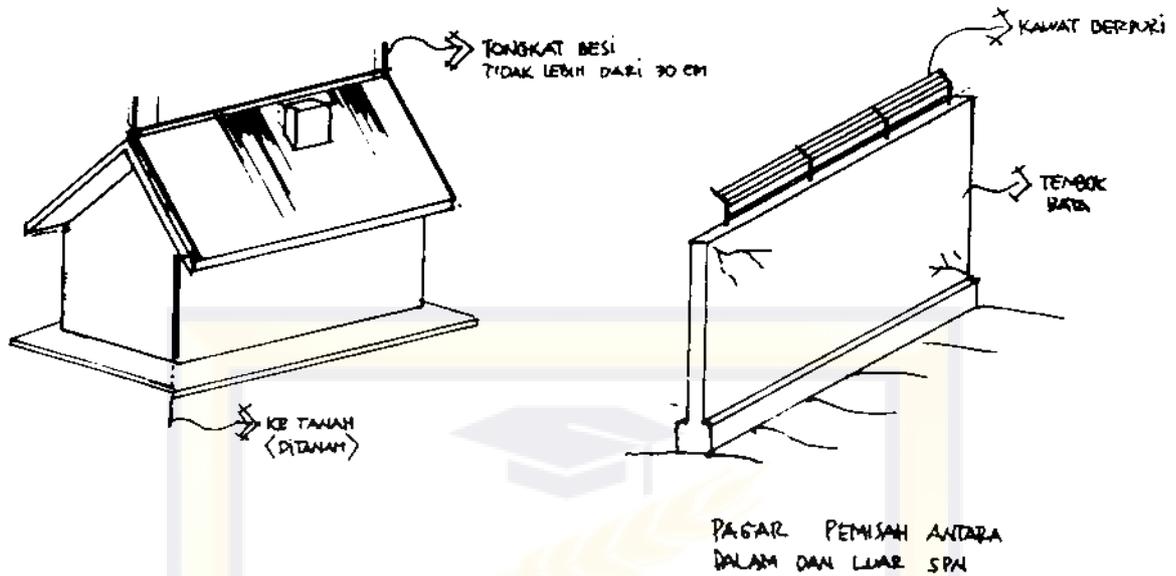
Air kotor terdiri dari air kotor padat (disposal padat) dan air kotor cair. Untuk pembuangan disposal padat dari toilet disalurkan ke bak peresapan. Untuk pembuangan air kotor cair diusahakan melalui saluran tertutup ke sistem drainase kota.

3. Sistem pengamanan bangunan

a. Penangkal petir

Menggunakan sistem sangkar faraday, yang merupakan pengembangan dari sistem firmlin, berupa tiang-tiang setinggi tidak lebih dari 30 cm dan kemudian masing-masing dihubungkan dengan kawat yang membentuk semacam jaringan yang dipasang pada bagian atas bangunan kemudian ujungnya ditanam ke dalam tanah.

SISTEM PENANGKAL PETIR



b. Pagar pembatas

Merupakan pagar pembatas yang membatasi antara di dalam lingkungan SPN dan diluar SPN

4. Sistem jaringan listrik

Untuk jaringan listrik adalah sebagai berikut :

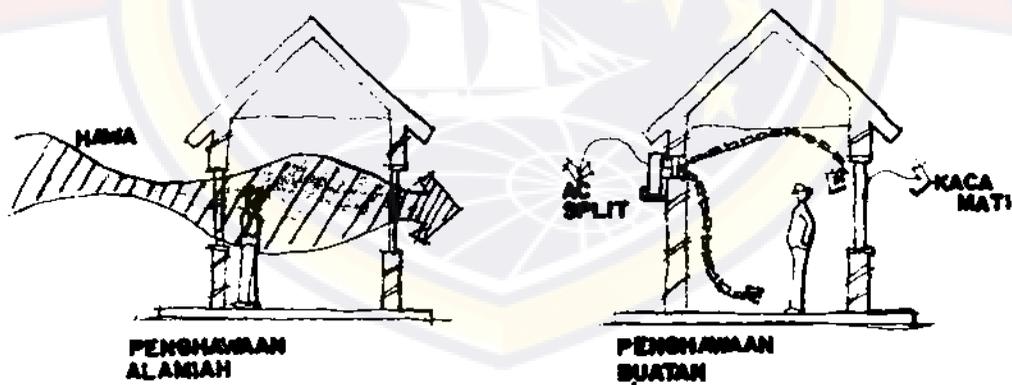
- a) Kebutuhan energi listrik untuk seluruh kegiatan bersumber dari PLN. Pembangkit listrik cadangan generator set (genset) disiapkan jika sewaktu-waktu listrik dari PLN padam.
- b) Sistem pendistribusiannya dipakai sentral pada gardu sub lingkungan (kelompok bangunan) yang diteruskan ke unit bangunan melalui panel-panel yang di tempatkan pada tempat-tempat yang aman dan tidak membahayakan, atau mengganggu aktifitas di dalam SPN, serta mudah dikontrol.

5. Sistem komunikasi

- a) Sistem komunikasi disediakan fasilitas-fasilitas sebagai berikut :
- b) Telpon yang langsung berhubungan dengan Telkom
- c) Sound sistem untuk keperluan pemanggilan, pengumuman.
- d) Dan jaringan lain yang dimiliki oleh Sekolah Polisi Negara (SPN).

6. Sistem penghawaan

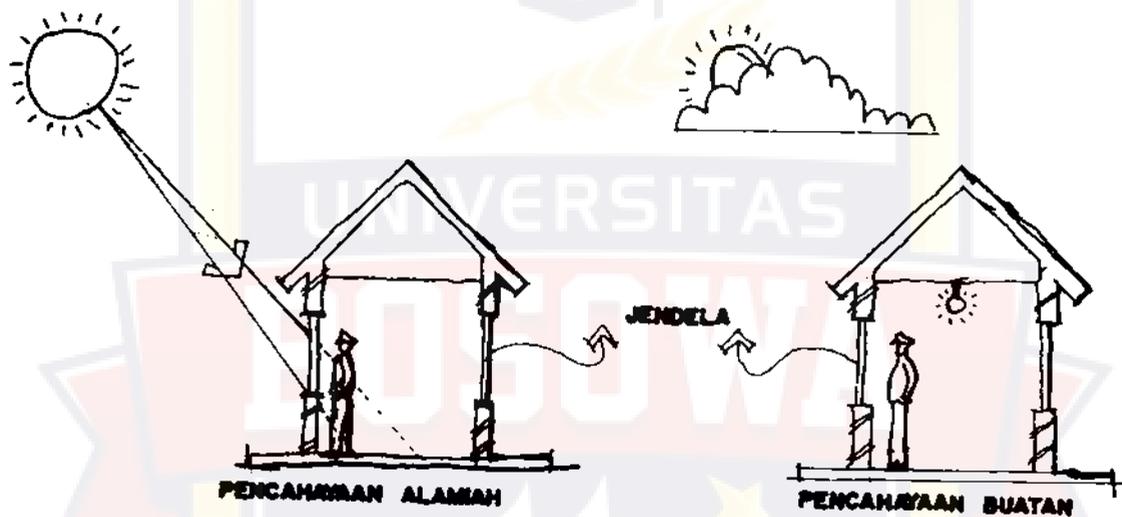
Untuk penghawaan sebagian besar ruang-ruang menggunakan penghawaan pasif (alamiah) sedangkan untuk ruang-ruang yang membutuhkan penghawaan aktif, maka sistem pendingin udara yang digunakan adalah AC split, ini disebabkan karena ruang tidak bersatu atau terpisah.



7. Sistem pencahayaan

Sistem pencahayaan yang digunakan disini, ada dua cara yaitu :

- a) Pencahayaan alamiah, dimana pemanfaatan secara maksimal untuk semua ruangan pada siang hari.
- b) Pencahayaan buatan, yaitu dari tenaga listrik dimana digunakan pada kegiatan malam hari atau pada waktu hari mendung.



8. Sistem sirkulasi dan pencapaian

- a) Sirkulasi di luar bangunan

Sirkulasi di luar bangunan yang dimaksudkan ialah :

- 1) Sirkulasi di luar tapak, yaitu kondisi/keadaan di luar tapak yang dapat mempengaruhi pencapaian ke dalam tapak, dan sistem sirkulasi ke dalam tapak.

2) Sirkulasi di dalam tapak, yaitu kondisi/keadaan di dalam tapak yang mempengaruhi pencapaian di dalam tapak bangunan dan perencanaan sistem sirkulasi di dalam bangunan, penentu sirkulasi di dalam tapak harus dipertimbangkan terhadap pelaku sirkulasi, yaitu kendaraan, barang dan manusia.

3) Sirkulasi kendaraan

Hal-hal yang harus diperhatikan :

- tidak ada cross sirkulasi kendaraan, baik kendaraan dinas, kendaraan pribadi, maupun kendaraan service
- lancar, aman, nyaman dan tersedianya pool kendaraan
- ada kejelasan jalur kendaraan
- kendaraan dapat langsung ke pelataran parkir atau ke garasi mobil

4) Sirkulasi manusia

Sirkulasi manusia merupakan salah satu sistem sirkulasi yang menentukan pencapaian manusia menuju tapak, sirkulasi manusia ini dapat dibagi atas :

- siswa yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan

- pimpinan, staf, anggota, karyawan yang melakukan kegiatan administrasi, pengelola dan pelayanan

5) Sirkulasi barang

Sirkulasi barang erat kaitannya dengan kegiatan pengadaan kebutuhan logistik, peralatan dan barang yang digunakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- sebaiknya terpisah dari sirkulasi manusia dan kendaraan
- tidak mengganggu sirkulasi di luar tapak dan didalam bangunan
- mudah dicapai
- tersedia pool kendaraan untuk bongkar muat

b) Sirkulasi dalam bangunan

Tujuan utama sistem sirkulasi dalam bangunan adalah segi pencapaian dari satu ruang ke ruang yang lain dapat dengan lancar, aman dan tertib, dapat di bedakan atas dua bagian yaitu :

- 1) Sirkulasi siswa yang melaksanakan pendidikan di dalam bangunan
- 2) Sirkulasi pimpinan, staf, anggota dan karyawan yang melakukan kegiatan dalam bangunan

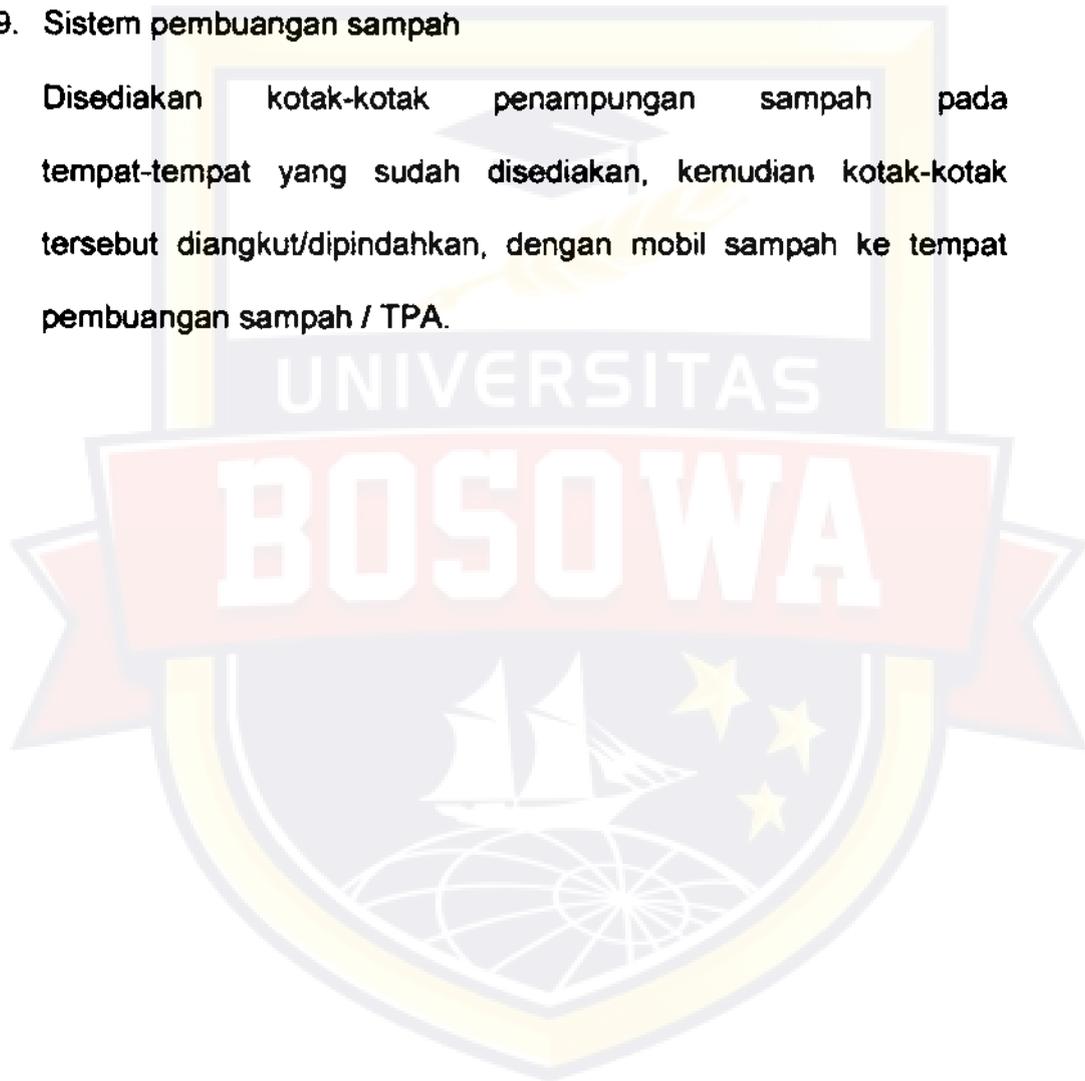
c) **Sirkulasi kendaraan**

Sirkulasi kendaraan yang beroperasi di dalam bangunan dibedakan atas dua bagian yaitu :

- 1) **Kendaraan dinas**
- 2) **Kendaraan pribadi/umum**

9. **Sistem pembuangan sampah**

Disediakan kotak-kotak penampungan sampah pada tempat-tempat yang sudah disediakan, kemudian kotak-kotak tersebut diangkut/dipindahkan, dengan mobil sampah ke tempat pembuangan sampah / TPA.



DAFTAR
PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- **Ashihara, Yoshinobu**; 1974, *Exterior Design in Architecture*, terjemahan Ir. S. Gunardi, ITS Surabaya.
- **Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**, 1992. *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi ke 2.
- **Francis D.K. Ching**, 1979, *Architecture From-Space and Order*, Van Nostran Rainhold Company, New York.
- **Kepala Kepolisian Republik Indonesia**, 1999, *Buku Pedoman Tugas Bintara Polri*, Lembaga Pendidikan dan Latihan.
- **Kepala Kepolisian Republik Indonesia**, 1999, *Perangkat Kendali Pendidikan Pertama Bintara Polri*.
- **Kepala Kepolisian Republik Indonesia**, 1999, *Pola Pentahapan Markas Besar Polri*.
- **Neufert, Ernst**, 1980, *Architect Data New York*: Habsted Press.
- **Pamsey/Slipper**, *Architectur Grafik Standar*.
- **Sleeper, Harold**, April, 1955, *Building Planning and Design Standart New York*, Jjon Wiley and Sons.

DAFTAR ISTILAH



DAFTAR ISTILAH

1. TKP = Tempat Kejadian Perkara
2. LP = Laporan Kepolisian
3. BA = Berita Acara
4. PUD = Peraturan Urusan Dalam
5. PERKUSIS = Peraturan Khusus Siswa
6. KODAL = Komando Pengendalian
7. PBB = Peraturan Baris – Berbaris
8. PUUD = Peraturan Undang-Undang Dasar
9. PUSKODALOPS = Pusat komando Pengendalian Operasi
10. SABHARA = Samapta Bayangkara
11. TIPIRING = Tindak Pidana Ringan
12. JUKMINU = Petunjuk Administrasi Umum
13. TUPOK = Tugas Pokok
14. FKK = Faktor Korelatif Kriminogen
15. PH = Police Hazart
16. AF = Ancaman Faktual
17. DAL-MAS = Pengendalian Masyarakat
18. PHH = Pengendali Huru-Hara
19. KOMPLEK = Komunikasi Elektronik
20. KUHP = Kitab Undang Hukum Pidana
21. KUHAP = Kitab Hukum Acara Pidana
22. TPTKP = Tindakan Pertama Pada tempat Kejadian Perkara

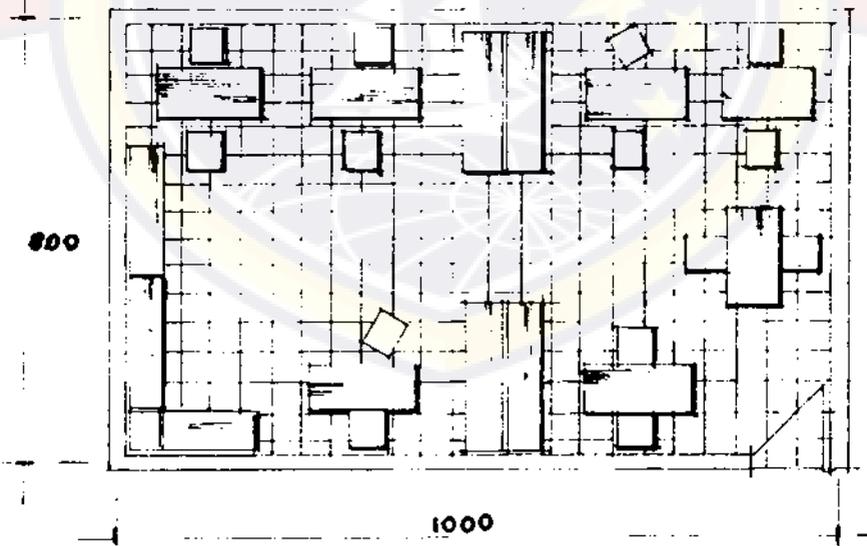
LAMPIRAN



RUANG KSPN 20 M²



R. Adm. 80 M²

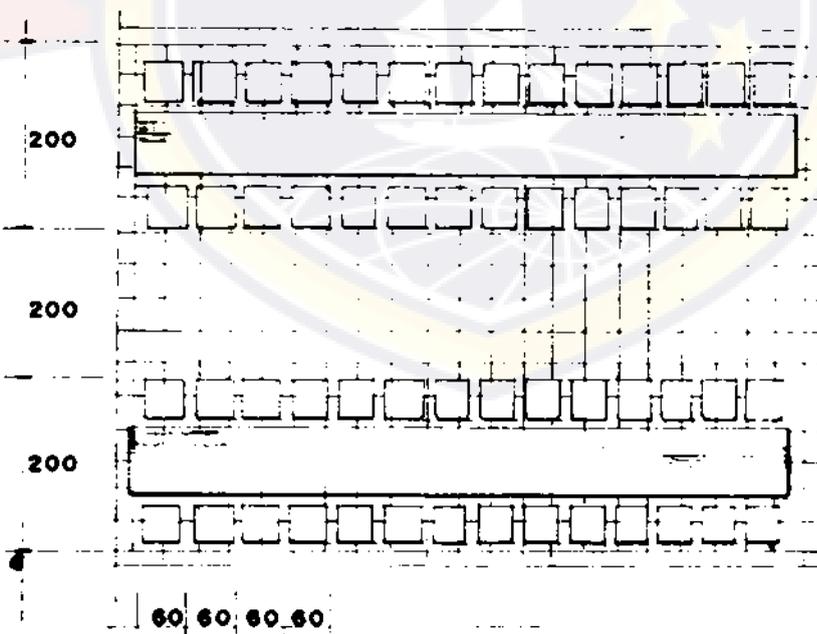


BARAK SISWA 255 M²



NEUVER EDISI 33 JILID 1

R. MAKAN 140 M²



NEUVERT EDISI 33 JILID 1



PENGHORMATAN

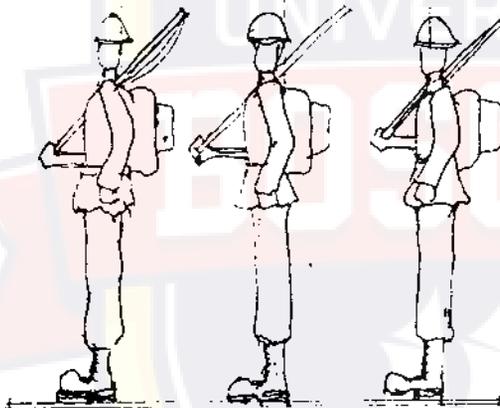


SIKAP ISTIRAHAT
DENGAN/TANPA ALAT

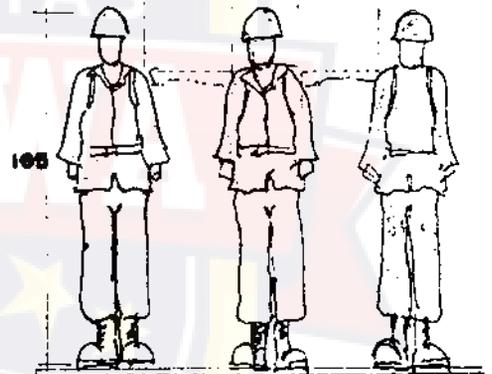


SPN. BATUA

SESUAI JARAK TANGAN

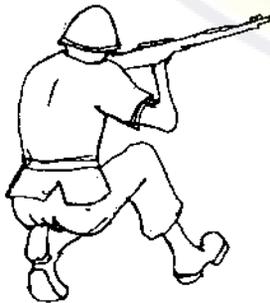


SIKAP PUNDAK SENJATA



SIKAP SEMPURNA

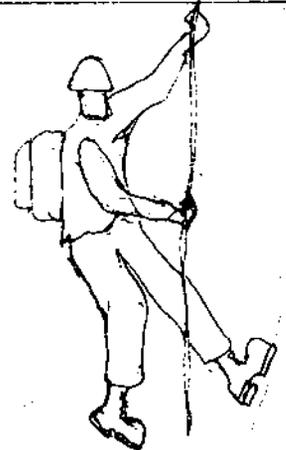
SPN. BAYU



SIKAP MENEMBAK

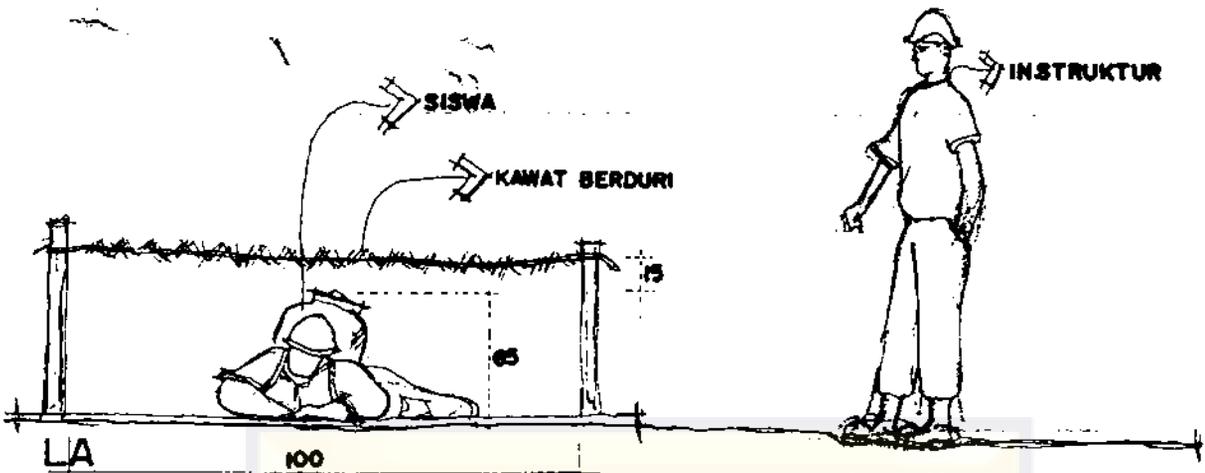


SIKAP PANJAT
TALI



SIKAP TURUN
TALI

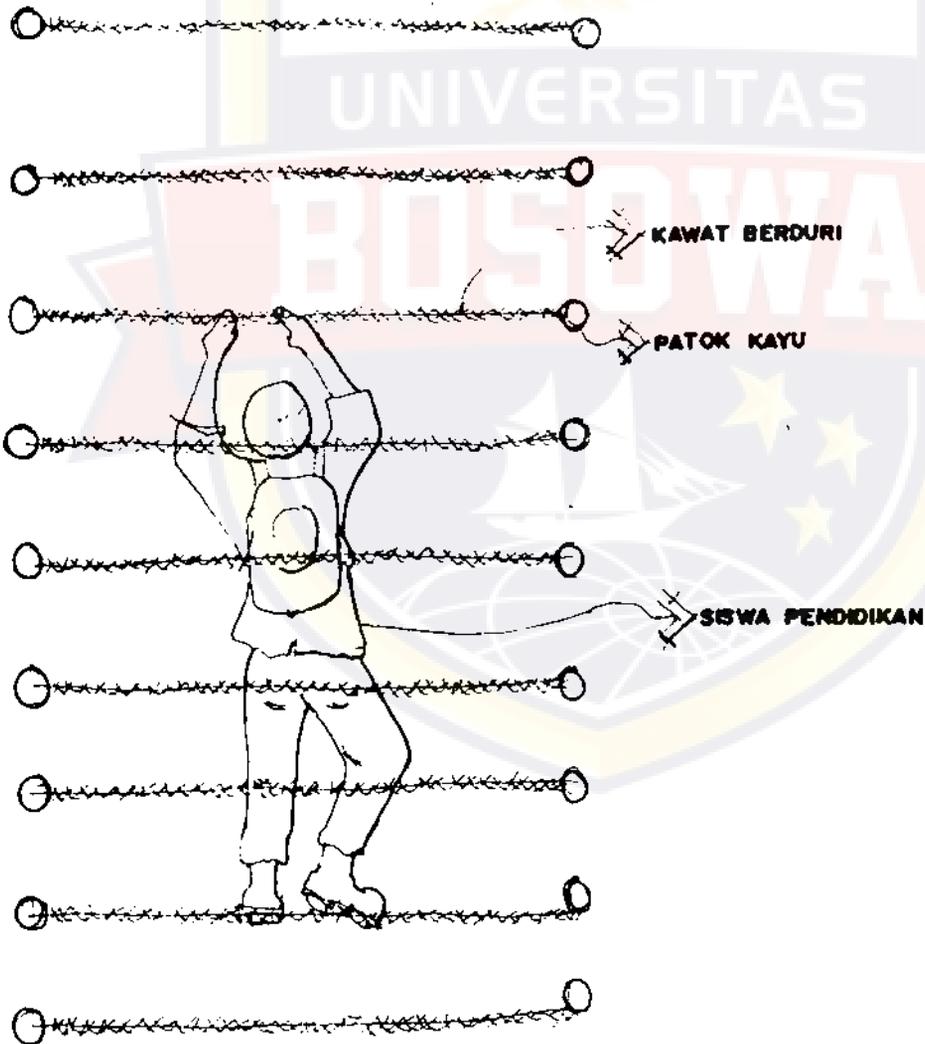
SIKAP DALAM POLRI



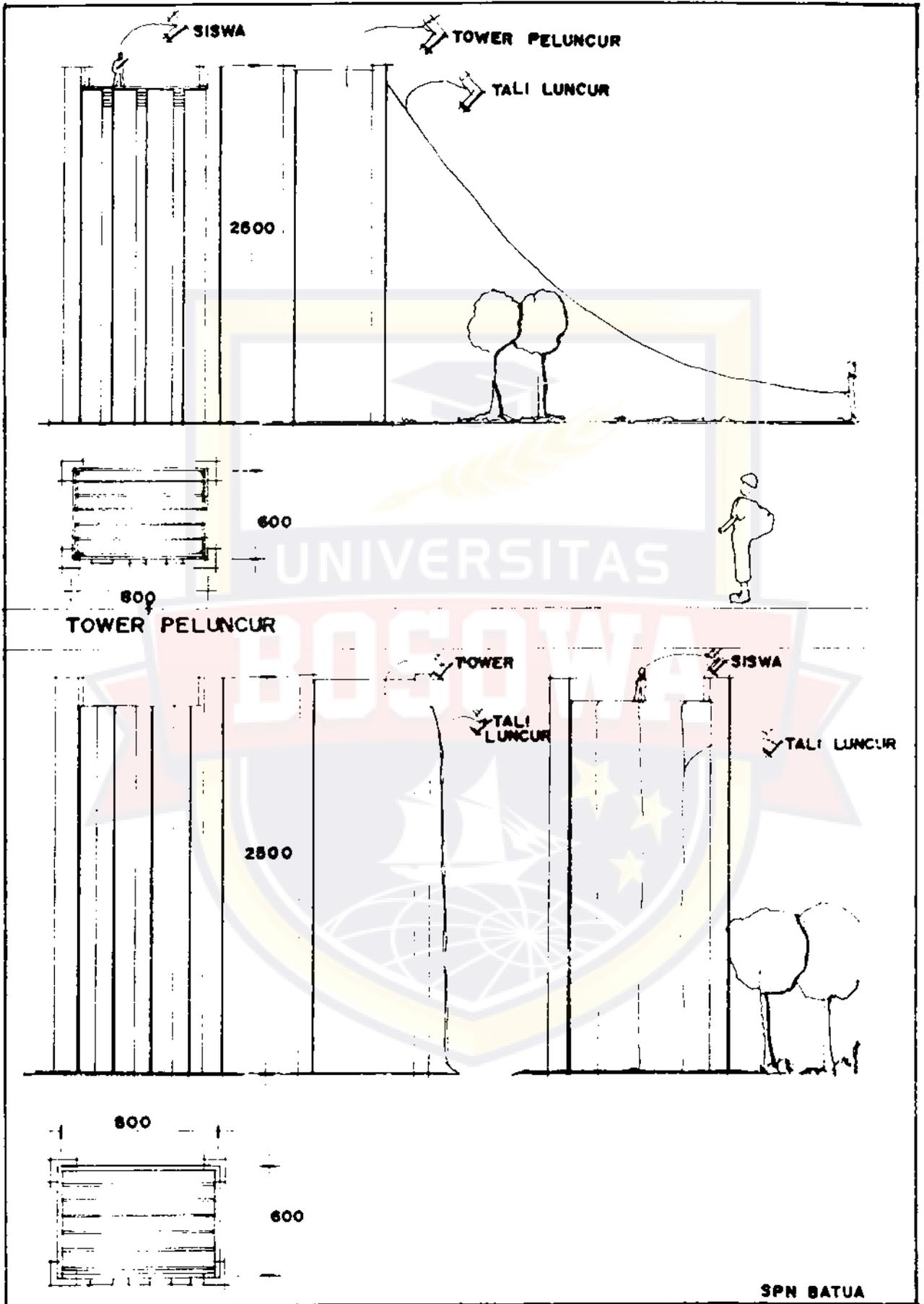
LA

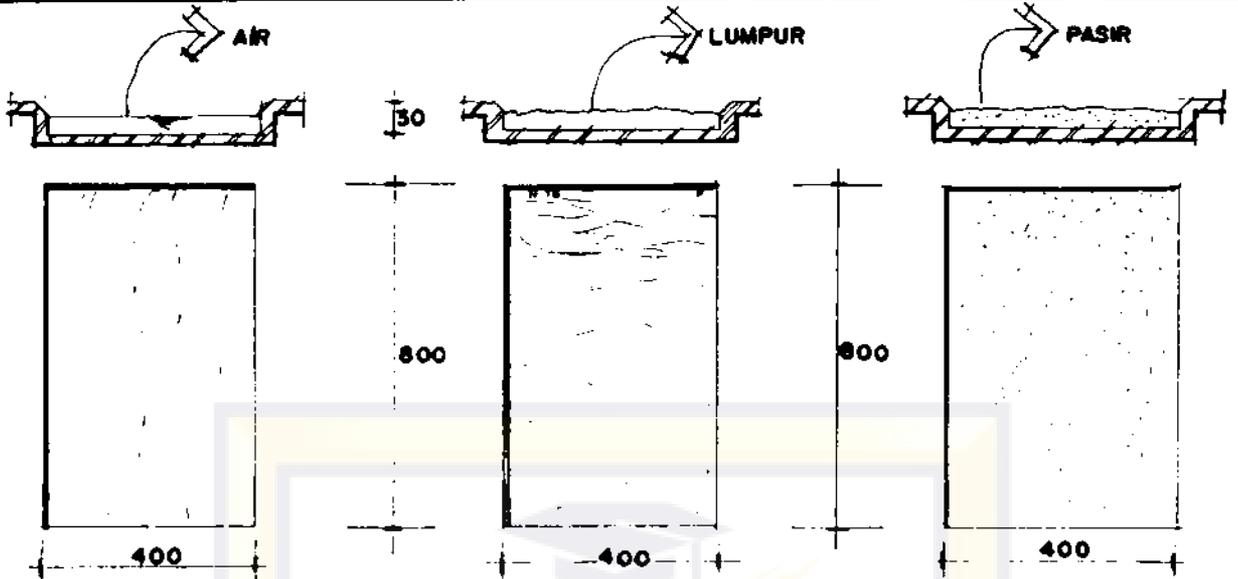
100

DEPAN



**LATIHAN MERAYAP
MELEWATI KAWAT BERDURI**

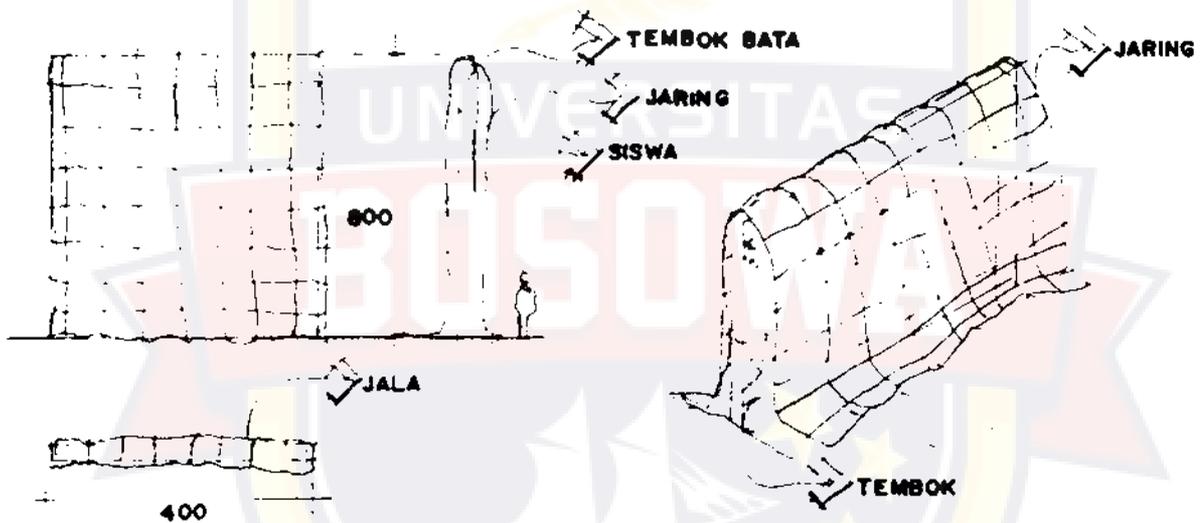




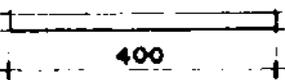
MEDAN LAT. BASAH

MEDAN LAT. BERLUMPUR

MEDAN BERPASIR

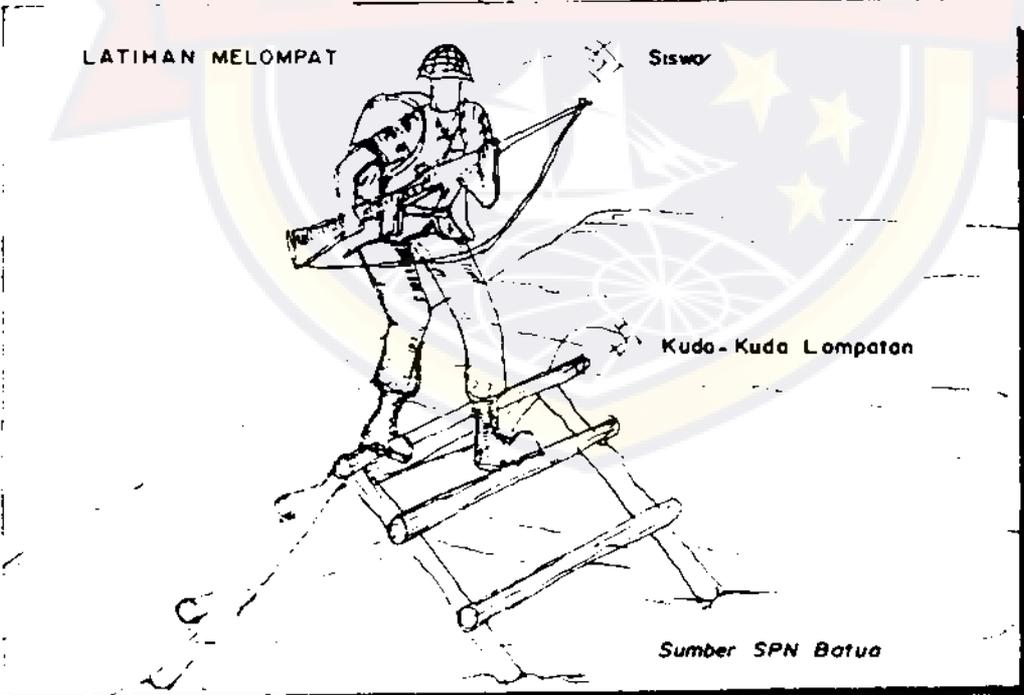
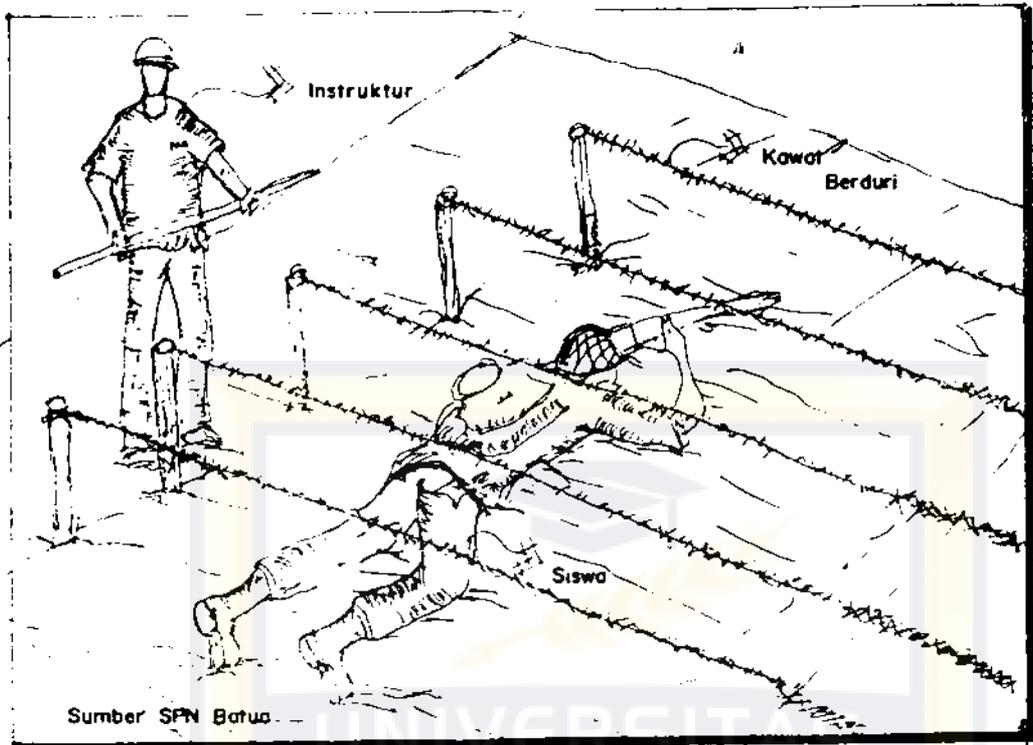


TEMBOK JALA PANJAT

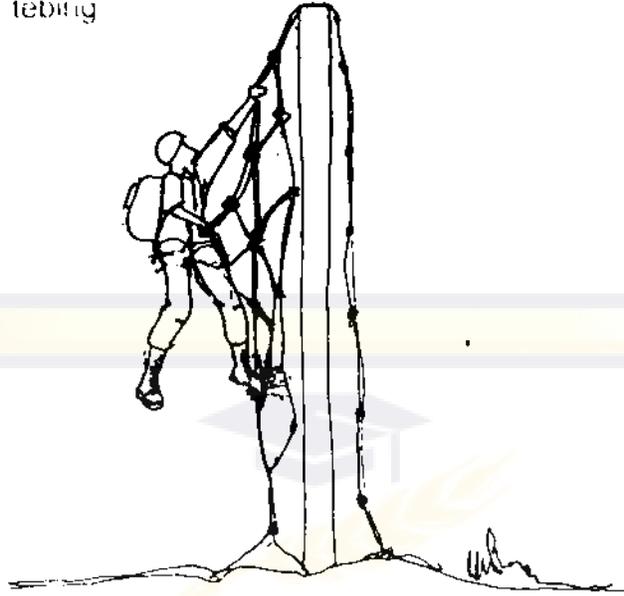


TEMBOK HALANG

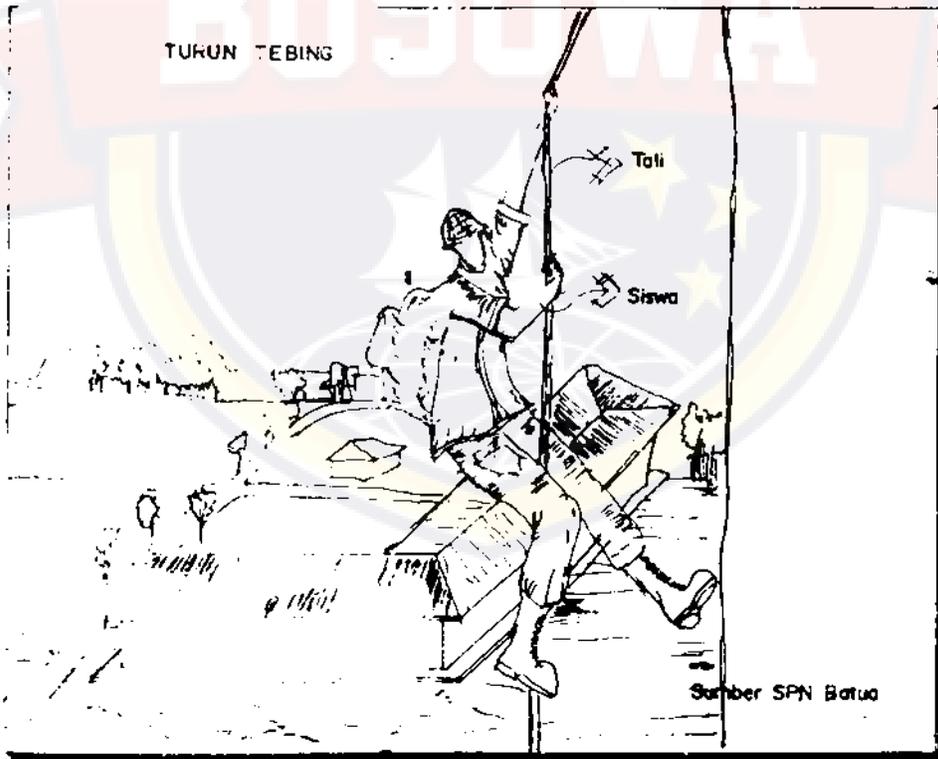
SPN. BATUA



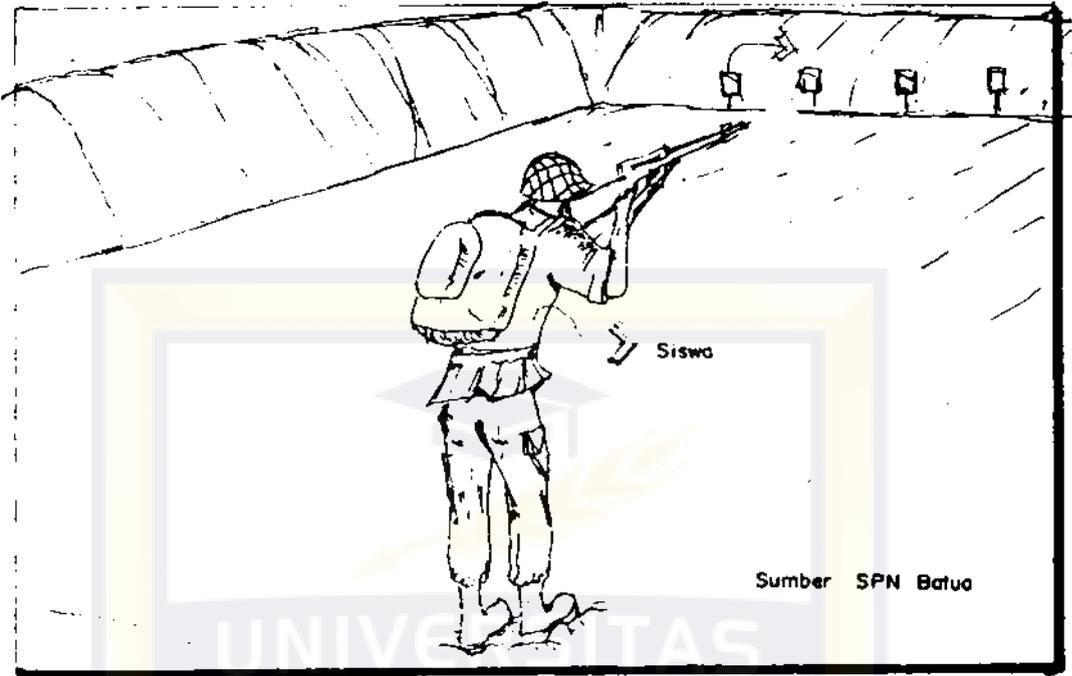
d. panjat tebing



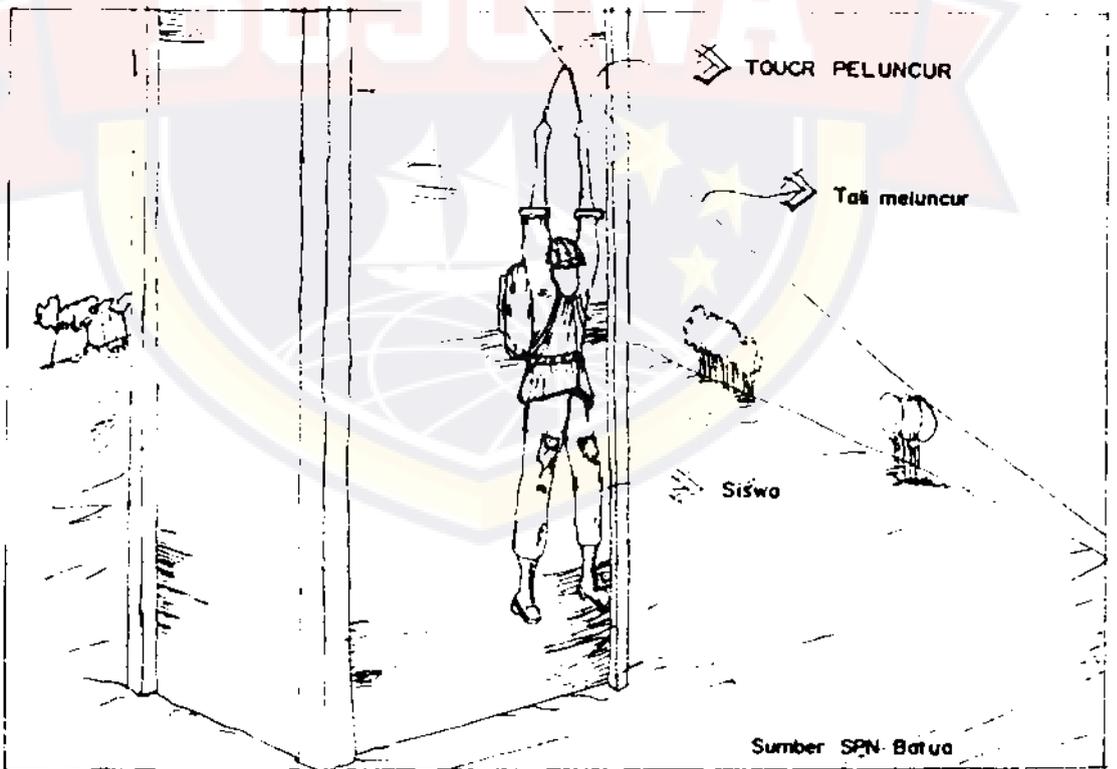
TURUN TEBING

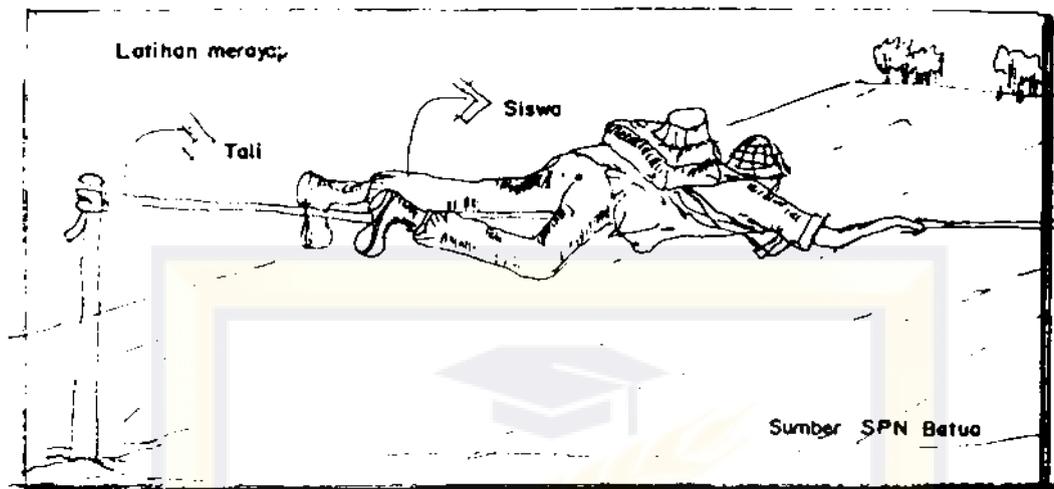


Menembak



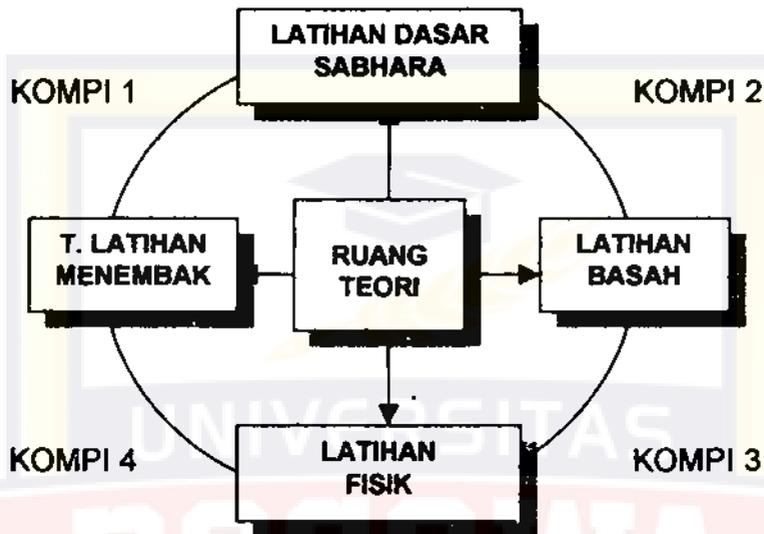
Meluncur





Sedangkan teknis pelaksanaan di lapangan yaitu pelatihan dan pengajaran secara bergilir, dengan pembagian jam pendidikan yang teratur dan terarah pada tiap-tiap kompi pelaksana latihan.

Skema Pembagian Sistem Pengajaran



F. Standar Latar Tugas dan Kemampuan Hasil Didik Pada SPN

1. Standar latar tugas

Aparat kepolisian yang memahami dan dapat mengerjakan serta menghayati tugas-tugasnya dalam kepastian sebagai aparat petugas umum kepolisian dengan kualitas sebagai bintanga sabhana polri.

2. Standar kemampuan hasil didik

Mengacu dari standar latar tugas sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan standar kemampuan hasil dikmaba bintanga polri, sebagai berikut :